



**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI
BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA JAWA TIMUR**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister**



Oleh :

**HANI PUSPITASARI
NIM.196020100111001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG
2022**

TESIS

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI
BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN
GERBANGKERTOSUSILA JAWA TIMUR**

Oleh :


HANI PUSPITASARI
196020100111001

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal: **15 Desember 2021**
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,




Prof. Dr. Moh. Khusaini, M.Si., M.A.
Ketua



Farah Wulandari Pangestuty, Ph.D.
Anggota



Mengetahui,
a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi



Dr. rer. pol. Ferry Prasetya, SE., M.App.Ec.
NIP 198012282005011002



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis dengan judul:

"PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA JAWA TIMUR"

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **Plagiasi**, maka saya bersedia menerima keputusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk menggugurkan Tesis ini dan mencabut gelar Magister yang telah saya peroleh, serta bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 11 Januari 2022
Mahasiswa



Nama : Hani Puspitasari
NIM : 196020100111001
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi



UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan secara moril maupun materil kepada pihak-pihak lain. Maka dari itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini dengan baik, yaitu

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis nikmat, sehat, iman dan segala-galanya yang terbaik dalam hidup
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, AR., M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya
3. Bapak Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak Dr.rer.pol.Ferry Prasetya, SE., M.App., Ec selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi beserta jajaran staff jurusan yang tentunya memiliki peranan penting atas terselesaikannya tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA selaku ketua komisi pembimbing yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini
6. Ibu Farah Wulandari Pangesty, S.E., M.E., Ph.D MA selaku anggota komisi pembimbing yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini
7. Bapak Dr. Susilo, SE., MS selaku dosen penguji utama yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini
8. Bapak Nugroho Suryo Bintoro S.E., M.Ec.Dev., Ph.D. selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini



9. Bapak Ahmad Mukhlisin dan Ibu Sri Wartiningsih selaku orang tua penulis yang sudah memberikan *support* dan juga memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini serta selalu mendoakan penulis. Semoga Allah selalu memberikan umur panjang, kesehatan dan juga rezeki yang barokah.

10. Adek dan sahabat penulis yaitu Mohammad Habil Habibi, Ainna Hutami S, Isnaini Maharani, Firdiana Firdaus, Fifi Majid, Diah Safitri, Amalia R dan Yulinda N yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Teman-teman seangkatan prodi S2 Ilmu Ekonomi yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama perkuliahan hingga sekarang

Malang, 31 Desember 2021

Penulis



ABSTRAK

Hani Puspitasari. Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2022. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur. Ketua Pembimbing: Moh Khusaini, Komisi Pembimbing: Farah Wulandari P

Penelitian ini menjelaskan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang dialokasikan dalam belanja modal dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif kausal. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan data panel dengan teknik analisis jalur (*path analysis*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Pajak daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun retribusi daerah tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah melalui belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan retribusi daerah dapat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melalui belanja modal.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal , Pertumbuhan Ekonomi



ABSTRACT

Puspitasari, Hani. Master Program in Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya. 2022. The Effect of Local Tax and Local Levy on the Economic Growth of Gerbangkertosusila Region in East Java through Capital Expenditure. Head of Advisory Commission: Moh Khusaini, Member of Advisory Commission: Farah Wulandari P.

This research explains the effect of local tax and local levy allocated to capital expenditures on the economic growth of Gerbangkertosusila region in East Java. This quantitative causal study uses secondary panel data obtained from the Directorate General of Financial Balance and Statistics Indonesia of East Java in the period of 2014-2019, analyzed using path analysis. This study finds that local tax does not significantly affect capital expenditures and that local levy significantly influences capital expenditures. Furthermore, local tax and capital expenditures significantly affect the economic growth, but local levy does not have any significant impact on the economic growth. In addition, local tax through capital expenditures does not significantly influence economic growth, but local levy significantly impacts the economic growth through capital expenditures.

Keywords: local tax, local levy, capital expenditures, economic growth



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Mu penulis dapat menyajikan tulisan tesis yang berjudul: Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur. Didalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi : pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi serta pajak daerah dan retribusi daerah melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 31 Desember 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Pentingnya Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk belanja produktif (belanja modal) dalam Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.2 Pajak dan Retribusi Daerah dalam Otonomi Daerah Error! Bookmark not defined.	
2.1.3 Belanja Modal dalam Pertumbuhan Ekonomi	25



2.1.4	Teori Pusat Pertumbuhan dalam Pembentukan Wilayah/Kawasan Gerbangkertosusila (GKS)	27
2.2	Penelitian Terdahulu	28
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN		34
3.1	Kerangka Pemikiran	34
3.2	Pengembangan Hipotesis Penelitian	35
3.2.1	Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal	35
3.2.2	Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal	36
3.2.3	Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi	36
3.2.4	Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi	37
3.2.5	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	38
3.2.6	Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal	39
3.2.7	Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal	39
BAB IV METODE PENELITIAN		40
4.1	Jenis Penelitian	40
4.2	Tempat dan Waktu Penelitian	40
4.3	Variabel dan Definisi Operasional Variabel	40
4.4	Jenis dan Sumber Data	42
4.5	Teknik Analisis Data	42
4.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	42
4.5.2	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	43
4.5.3	Uji Hipotesis Penelitian	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		47
5.1	Gambaran Umum Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur	47



5.2. Hasil Penelitian	52
5.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	52
5.2.2 Analisis Jalur (Path Analysis).....	55
5.2.3 Pengujian Hipotesis	59
5.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
5.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal	64
5.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal	66
5.3.3 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	69
5.3.4 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi	72
5.3.5 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	74
5.3.6 Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur	77
5.3.7 Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur	79
BAB VI PENUTUP.....	81
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Analisis Deskripsi Variabel Pajak Daerah.....	53
Tabel 5.2 Analisis Deskripsi Variabel Retribusi Daerah	53
Tabel 5.3 Analisis Deskripsi Variabel Belanja Modal	54
Tabel 5.4 Analisis Deskripsi Variabel Pertumbuhan Ekonomi	54
Tabel 5.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda dengan Belanja Modal sebagai Variabel Dependen	55
Tabel 5.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Dependen	56
Tabel 5.7 Hasil Uji t dengan Belanja Modal sebagai Variabel Dependen	59
Tabel 5.8 Hasil Uji t dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Dependen	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Pajak & Retribusi Daerah di Kawasan GKS (2014-2019)	3
Gambar 1.2 Belanja Modal di Kawasan GKS (2014-2019)	5
Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan GKS (2014-2019)	6
Gambar 2.1 Kurva Scully	17
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian	34
Gambar 4.1 Model Analisis Jalur	44
Gambar 5.1 Peta Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur	48
Gambar 5.2 Hasil Sobel Test Pajak Daerah	61
Gambar 5.3 Hasil Sobel Test Retribusi Daerah	62
Gambar 5.4 Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa & Pajak Daerah Kawasan GKS (2014-2019)	65
Gambar 5.5 Belanja Modal & Retribusi Daerah Kawasan GKS (2014-2019)	67
Gambar 5.6 Pajak Daerah & Dana Perimbangan Kawasan GKS (2014-2019)	70
Gambar 5.7 Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kawasan GKS (2014-2019)	73
Gambar 5.8 Belanja Modal, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa & Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan GKS (2014-2019)	75
Gambar 5.9 Pajak Daerah, Belanja Modal & Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan GKS (2014-2019)	77
Gambar 5.10 Retribusi Daerah, Belanja Modal & Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan GKS (2014-2019)	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Penelitian	94
Lampiran 2 Tabulasi dari Variabel Penelitian	95
Lampiran 3 Hasil Statistik Deskriptif	98
Lampiran 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	99
Lampiran 5 Hasil Uji Sobel	100
Lampiran 6 Matriks Penelitian Terdahulu	101



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri, agar dapat mengatur serta mengoptimalkan sumber daya daerah yang dimilikinya (Mariun, dalam Mulyanti D 2017). Dengan adanya kewenangan ini suatu daerah dapat lebih leluasa dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pemerintah daerah dapat menggali sumber pembiayaannya sendiri serta menyusun dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya. Namun dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus mempertimbangkan aspek kelestarian dan konsisten dalam mewujudkan manfaat secara berkelanjutan (Efendi, 2014).

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah harus menerapkan asas dari kemandirian daerah untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerahnya. Pada pemanfaatan sumber daya daerah, pemerintah daerah dapat menghasilkan berbagai macam sumber pendapatan asli daerah diantaranya retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan asli daerah lainnya yang sah dan pendapatan dari pengembalian. Namun dari beberapa macam pendapatan tersebut, retribusi daerah dan pajak daerah adalah sumber keuangan yang terbesar diantara sumber lainnya. Pemerintah daerah dapat menggunakan kedua sumber tersebut untuk membiayai pengeluaran dari pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah yang digunakan sebagai pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu Pemerintah daerah harus menerapkan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang stabil untuk

membantu kelangsungan perekonomian di daerahnya sehingga berguna untuk perencanaan keuangan dan anggaran (Khusaini, 2018)

Dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan akan meningkatkan pembangunan dan berdampak pada perekonomian di daerah.

Pajak dan retribusi daerah yang dipungut dari masyarakat dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana umum yang dapat dijadikan sebagai penunjang untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Mutiara D (2015) pajak dan retribusi daerah mempunyai kedudukan penting dalam menentukan jumlah output yang dihasilkan, dan dianggap sebagai modal dalam melakukan pembangunan daerah yang selanjutnya akan berdampak pada perekonomian daerah.

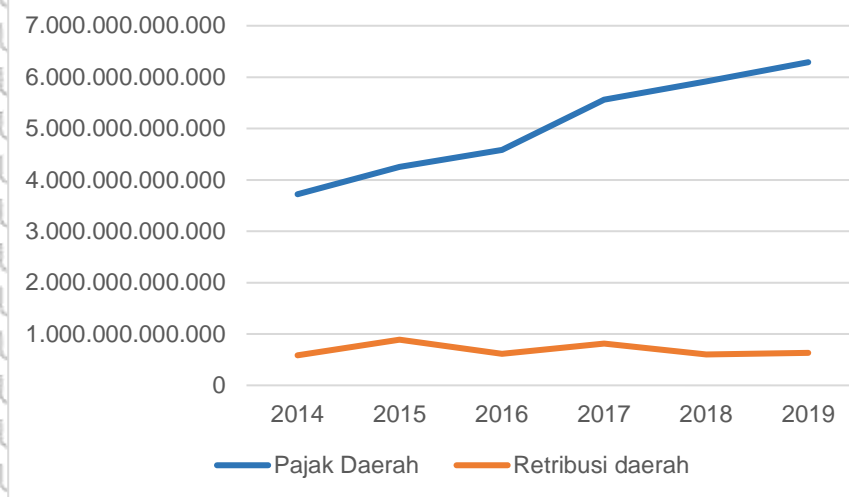
Untuk pemerataan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi

Jawa Timur membentuk kawasan Gerbangkertosusila (GKS) yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 1996 mengenai RTRW

Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1996 tentang RTRW Nasional. GKS ini merupakan salah satu kawasan pembangunan yang masuk dalam satuan wilayah pembangunan (SWP) yang memiliki tujuan untuk pemerataan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi jawa timur

melalui pusat pelayanan di masing-masing SWP. Untuk itu dalam membantu mewujudkan tujuan dari adanya GKS, diperlukan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipercaya dapat digunakan untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Gambar 1.1
Perkembangan Pajak & Retribusi Daerah Kawasan GKS (2014-2019)



Sumber: DPJK, 2021 (data diolah)

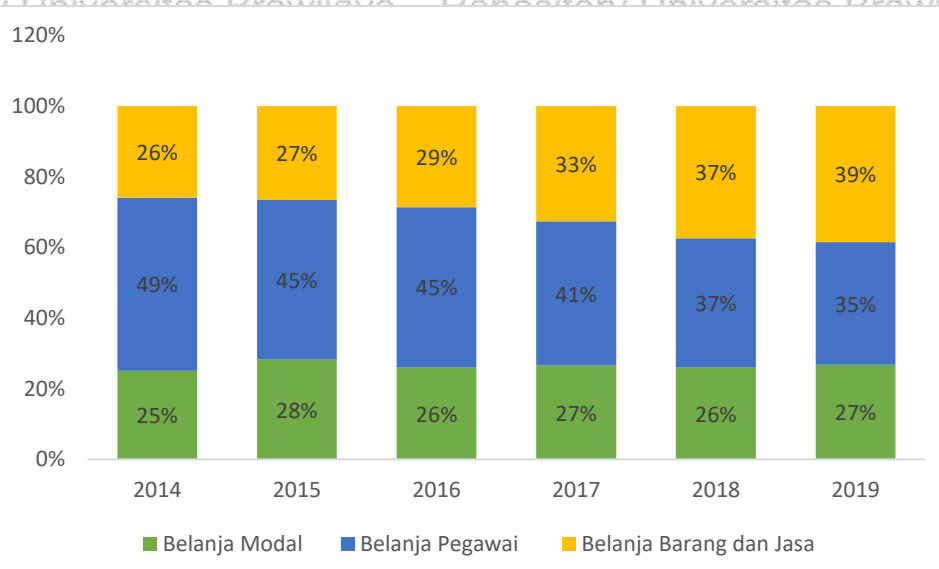
Perkembangan pajak dan retribusi daerah di Kawasan GKS mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun (Gambar 1.1). Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pajak daerah yang terjadi dari tahun 2014-2019 sebesar 69,08%. Peningkatan yang terjadi pada pajak daerah ini dapat disebabkan karena upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak daerah. Peningkatan juga terjadi pada retribusi daerah di tahun 2014-2019 sebesar 8,66%. Pada tahun 2016 dan 2018 retribusi daerah mengalami penurunan namun di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,11%.

Dampak yang timbul dengan adanya peningkatan pajak dan retribusi daerah adalah dapat mendorong pendapatan asli daerah. Peningkatan dari pendapatan daerah diharapkan dapat dialokasikan untuk belanja daerah yang sifatnya produktif seperti belanja modal. Menurut Sianturi (2009) pajak daerah dengan belanja modal memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Pemerintahan di China juga menyatakan hal yang serupa, menurut Bai Junhong & Li Jing (2011) bahwa pajak daerah digunakan untuk belanja modal dalam meningkatkan inovasi pada pemerintahannya. Begitupun dengan retribusi

daerah, jika retribusi daerah meningkat maka akan semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh, sehingga akan dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal. Hal tersebut juga didukung penelitian dari Vodounhessi, A., & von Münch, E. (2006) menyatakan bahwa retribusi digunakan dalam mendanai belanja modal di Kumasi, Ghana. Penelitian dari Runtu, Walewangko & Tolosang (2016) juga menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kota Manado.

Belanja modal merupakan belanja dari pemerintah daerah yang mempunyai manfaat melebihi dalam satu tahun anggaran dan digunakan untuk menambah aset yang bersangkutan (PP nomor 71 tahun 2010). Belanja modal dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka membeli aset tetap berwujud yang memiliki manfaat lebih dalam satu periode. Dengan adanya belanja modal dapat memperoleh aset tetap seperti infrastruktur, tanah, peralatan, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya yang sangat diperlukan untuk menambah aset dari pemerintah daerah namun aset tersebut bukan diniatkan untuk dijual (Ghozali, 2008). Sehingga belanja modal ini dapat meningkatkan pembangunan untuk pelayanan publik yang akhirnya akan berdampak pada perekonomian daerah. Namun faktanya selama ini pendapatan daerah masih sedikit yang dialokasikan untuk belanja modal sedangkan dengan adanya belanja modal tersebut akan lebih banyak memberikan *multiplier effect* kepada perekonomian daerah. Menurut Sundika & Budiarta (2017) juga menyatakan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang sebagian besar masih mengalokasikan pendapatan daerahnya untuk keperluan belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa bukan untuk belanja modal (Sundika & Budiarta, 2017).

Gambar 1.2 Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa di Kawasan GKS (2014-2019)



Sumber : DPJK, 2021 (data diolah)

Pada tahun 2014 hingga tahun 2019 belanja pegawai dan belanja barang dan jasa memiliki persentase lebih unggul jika dibandingkan dengan persentase pada belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila (Gambar 1.2). Belanja pegawai yang awalnya pada tahun 2014 mendominasi namun di tahun 2018 dan 2019 sedikit mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Belanja barang dan jasa mengalami kenaikan disepanjang tahun 2014–2019. Sedangkan belanja modal terus mengalami fluktuasi dari tahun 2014– 2019 dan memiliki persentase tertinggi di tahun 2018 sekitar 28%.

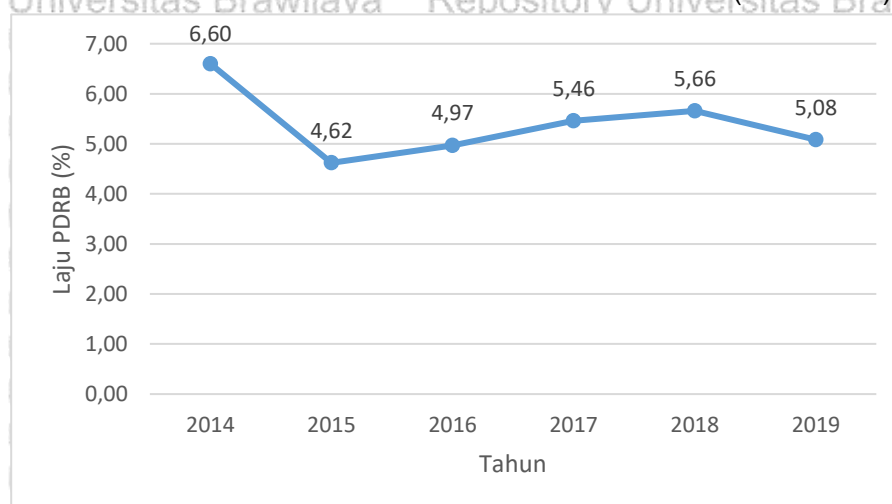
Sementara itu ketika terjadi peningkatan pada belanja modal akan dapat meningkatkan pembangunan pada daerah, sehingga pada akhirnya akan mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan teori Keynes dalam Jhingan (2003) yang menekankan bahwa untuk menghindari kondisi yang stagnan pada pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah dapat berupaya untuk meningkatkan jumlah belanja modal yang merupakan salah satu bentuk dalam pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Penelitian dari Nyarko A, Bhasin & Aglobitse (2019) di Ghana pada tahun 1980-2017 juga

menyatakan bahwa belanja modal sebagai peningkat dalam pertumbuhan ekonomi, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang terkait. Belanja modal pemerintah daerah yang juga dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana publik akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pembangunan (Todaro, 2014). Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya dalam peningkatan produksi barang dan jasa dan kenaikan output perkapita. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai target utama dari pembangunan dan hasilnya akan dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu indikasi yang terlihat ketika terjadi pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Saputra dan Mahmudi (2012) menjelaskan adanya keterkaitan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kuncoro (2004) juga menyatakan bahwa dalam hipotesis *trickle down effect* yang melekat pada *growth paradigm* menyebutkan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes pada kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.3 Pertumbuhan ekonomi di Kawasan GKS (2014-2019)



Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Gerbangkertosusila mengalami fluktuasi di sepanjang tahun 2014-2019 (Gambar 1.3). Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada 2014 sebesar 6.60%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di tahun 2015 sebesar 4.62% yang kemudian terus mengalami fluktuasi di tahun 2019 hingga mencapai 5.08%. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi disekitar daerah pembentukan Kawasan Gerbangkertosusila mengalami ketimpangan terutama di wilayah Madura. Bahkan menurut Badan Pusat Statistika (2019) pertumbuhan ekonomi diwilayah Madura termasuk terendah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur yang hanya mencapai 0,14% ditahun 2019 disalah satu wilayahnya.

Dengan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila yang mengalami fluktuasi seperti yang terlihat pada (Gambar 1.3) nampaknya akan mempengaruhi tujuan dari dibentuknya Kawasan Gerbangkertosusila yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur di tahun 2019 hanya 2 daerah yang berada di peringkat 5 besar yaitu Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya dari 7 Kabupaten/ Kota yang masuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur menurut Badan Pusat Statistik pada 10 tahun terakhir juga mengalami fluktuasi dan puncaknya di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 18,56%. Salah satu penyebabnya dikarenakan turunya pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Gerbangkertosusila. Sementara itu Kawasan Gerbangkertosusila yang telah dibentuk pada tahun 1996 ternyata tidak dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Sehingga pembentukan Kawasan Gerbangkertosusila untuk membantu meningkatkan perekonomian Jawa Timur belum dapat terlaksana atau tercapai dengan baik.

Secara empiris permasalahan mengenai pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi topik bagi berbagai



penelitian seperti Varlitya C (2017), Damaningrum A (2015), dan Rodriguez & Kroijer A (2018) & Sufardi (2019). Masela M & Halim A (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa di Kawasan Eks Kerisidenan Malang, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan hal yang sama juga terjadi pada penelitian oleh Mutiara D (2015) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Sementara hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Ibrahim A, Asmawati & Adamy Y (2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, dan hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Aceh Utara oleh Mina M & Ratna (2020). Perbedaan hasil penelitian ini diakibatkan karena perbedaan dari potensi daerah yang dimiliki, lokasi penelitian dan jumlah pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah. Meskipun hasilnya berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, namun dari analisis menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang penting untuk membiayai daerah sehingga akan menunjang kegiatan perekonomian daerahnya.

Pajak dan retribusi daerah harus benar-benar dikelola dengan baik dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, karena hal ini akan sangat terkait dengan pengalokasian pada belanja pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah ternyata lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sehingga dana tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk belanja modal dalam perekonomian ini dirasa masih kurang diperhatikan atau kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Sementara itu jika pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan lebih banyak untuk belanja modal yang produktif maka akan dapat menambahkan aset

daerah yang digunakan untuk penunjang dalam memberikan pelayanan publik (Anggun H, 2016). Sehingga jika belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah meningkat maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa penelitian yang meneliti terkait pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal, antara lain adalah Mamonto, Kalongi & Tolosang (2015), Sudika & Budiarta (2017), Purba dkk (2018) dan Tawakkal (2018).

Natoen A dkk (2020) menyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Sementara sebaliknya Subianto & Sipahutar (2020) juga menyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan itu dapat terjadi diantaranya perbedaan dari lokasi penelitian dan masih belum optimalnya di beberapa pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Meskipun terdapat perbedaan antara penelitian satu dengan yang lain, pajak daerah dan retribusi daerah sudah semestinya harus dipungut lebih maksimal agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga mampu dialokasikan untuk belanja modal.

Penelitian lain mengenai belanja modal juga dilakukan oleh Waryanto P (2017) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu Ibrahim F dkk (2018) juga menyatakan di Kawasan Sulawesi belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang sama dilakukan kembali namun dengan hasil yang berbeda yaitu oleh Fitri N & Putri S (2019) dipenelitiannya yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia dan Priambodo (2015) juga menyatakan bahwa di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah



belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari beberapa penelitian sebelumnya terjadi perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya, perbedaan ini diantaranya dapat disebabkan karena lokasi penelitian yang berbeda, pemerintah daerah yang masih menggunakan pendapatan daerah untuk membiayai belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sehingga belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Walaupun telah terjadi perbedaan sebelumnya, belanja modal sudah seharusnya dialokasikan untuk belanja yang sifatnya produktif seperti belanja modal, sehingga hal tersebut akan mendorong peningkatan pada pertumbuhan ekonomi.

Jika ditinjau dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, peneliti telah mengungkapkan bahwa terjadi ketidakkonsistenan antar variabel yang disebabkan oleh beberapa faktor dan ketidaksamaan pada tempat penelitian. Untuk itu peneliti berfokus untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila yang mengalami fluktuasi. Analisis pertumbuhan ekonomi ini ditinjau melalui variabel pajak dan retribusi daerah serta variabel belanja modal yang menjadi variabel intervening dalam penelitian ini. Tujuannya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang semakin meningkat diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan pengalokasian belanja modal dan akhirnya akan membawa peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila. Pemilihan dari penggunaan Kawasan Gerbangkertosusila adalah karena wilayah ini merupakan salah satu kawasan pembangunan yang masuk dalam satuan wilayah pembangunan (SWP).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur".



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur?
5. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur ?
6. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur ?
7. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur
2. Menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur
3. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur
4. Menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur

5. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur

6. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur

7. Menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya beberapa tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini, maka diharapkan dari penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara akademis dan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal serta dapat menjadi sumber data atau kerangka acuan untuk penelitian lanjutan yang sejenis

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah setempat dalam melakukan perencanaan perekonomian dan kebijakan yang akan diterapkan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pentingnya Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk belanja produktif (belanja modal) dalam Pertumbuhan Ekonomi

Pengalokasian anggaran merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengalokasikan pendapatan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah untuk belanja yang bersifat produktif. Belanja produktif dipergunakan untuk membeli barang-barang yang sifatnya produktif seperti infrastruktur dan sarana prasarana pemerintah daerah. Menurut Suryani F & Pariani E (2018) belanja produktif juga sering disebut dengan belanja modal.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang pada masa otonomi daerah, pajak dan retribusi daerah memiliki peran dalam meningkatkan belanja modal. Di dalam Undang-undang ini membahas mengenai pemerintah daerah yang dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang ada di daerahnya hingga menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat berupa pajak dan retribusi daerah untuk membiayai belanja modal (belanja daerah). Menurut Rahmawati & Tjahjono (2018) di D.I Yogyakarta menyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan pada peningkatan belanja modal. Dengan semakin meningkatkan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat meningkatkan belanja modal untuk menambah aset tetap dan aset lainnya pemerintah daerah, sehingga kualitas dari pelayanan publik dengan adanya penambahan aset pemerintah daerah akan semakin baik.

Selanjutnya belanja modal yang memiliki sifat belanja produktif akan

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini sesuai pendapat dari Bania N, Gray J & Stone J (2007) yang menyatakan bahwa pemungutan pajak juga akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan namun dengan syarat harus dipergunakan untuk membiayai belanja yang sifatnya produktif.

Hal ini juga sesuai dalam teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Barro pada tahun 1990 dalam Soewardi Tiara, Candra & Angga (2018) yang menyatakan bahwa pajak yang dialokasikan untuk belanja yang bersifat produktif akan dapat digunakan sebagai investasi publik (pemerintah) yang memiliki dampak terhadap produktivitas investasi sektor swasta (masyarakat).

Dimana hal tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan dapat digunakan masyarakat sebagai perantara untuk meningkatkan produktivitasnya sebagai akibat dari disposable income yang berkurang karena adanya kenaikan pajak.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Paul Romer (1986), Lucas (1988) yang muncul di sekitar tahun 1980an yang kemudian dilanjutkan oleh Barro (1990). Dasar pemikiran pada teori pertumbuhan endogen ini disebabkan karena ketidakpuasan dengan faktor eksogen seperti kemajuan teknologi yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam pemikiran ini mengemukakan bahwa pentingnya peranan dari pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Menurut Barro (1990), Barro & Martin (1995) dan Mendoza (1997) model pertumbuhan endogen menyediakan mekanisme dimana kebijakan fiskal dapat menentukan tingkat output dan kondisi mapan tingkat pertumbuhan.

Pemerintah menggunakan pendapatan dari pajak untuk membiayai pengeluarannya. Di asumsikan pemerintah membeli barang publik yang

memiliki sifat *non rival* dan *non excludable* dari pihak swasta dan kemudian pihak swasta (masyarakat) dapat menggunakannya. Pengeluaran ini masuk ke dalam fungsi produksi sebagai input produktif, sebagai hasil dari modelnya di reduksi dalam fungsi produksi Cobb-Douglas yang menunjukkan terjadinya constant return to scale sebagai berikut (Barro & Martin (1992,1995)).

$$Y = AK^{1-\alpha}g^{\alpha}$$

Keterangan

Y : Output produksi dalam suatu perekonomian

A : Bilangan positif dan konstan yang merefleksikan tingkat teknologi

K : Modal yang tidak hanya modal fisik namun modal non fisik

g : Jumlah input yang diberikan oleh publik (pemerintah)
(diasumsikan bahwa input ini dibiayai oleh pajak)

α : Elastisitas output modal

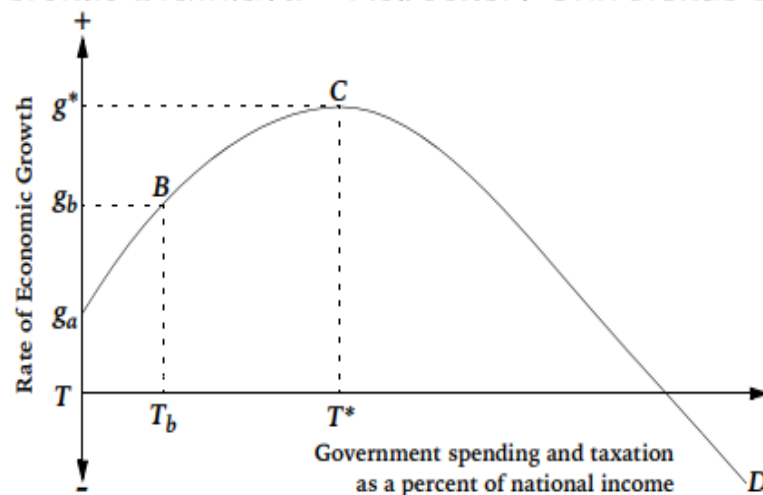
Pada pertumbuhan endogen faktor teknologi tetap mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun model pertumbuhan endogen lebih menganggap bahwa faktor teknologi tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Todaro,2000). Modal tidak saja berasal dari modal fisik, namun juga dapat berasal dari non fisik diantaranya yaitu modal sumber daya manusia seperti pendidikan, pengetahuan, kesehatan dan pelatihan.

Pada model pertumbuhan endogen oleh Barro, pajak yang digunakan untuk hal yang sifatnya produktif akan memiliki dampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur dan pendidikan. Sebaliknya jika pajak digunakan untuk hal yang sifatnya tidak produktif seperti pembayaran utang maka akan memberikan dampak yang kurang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak yang digunakan untuk membiayai utang akan

mengurangi porsi dari penerimaan pajak tersebut, sehingga akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam model pertumbuhan Barro untuk menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat perpajakan menggunakan kurva U terbalik yang akan menunjukkan sampai pada titik maksimum tertentu pajak yang maksimal akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan pada kurva scully (Chao J & Grubel H, 1998).

Gambar 2.1 Kurva Scully



Sumber : Chao J & Grubel H (1998)

Pada gambar 2.1 dijelaskan bahwa pengeluaran dari pemerintah yang diasumsikan dibiayai oleh pajak berada pada titik nol (T) dan kemudian pertumbuhan ekonomi di titik g_a yang dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi terendah karena saat itu pemerintah dianggap tidak memiliki anggaran untuk menyediakan barang publik. Pemerintah mulai melakukan pengeluaran yang ada pada titik T_b sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat menuju titik g_b karena pemerintah mulai melakukan pengeluarannya yang dibiayai oleh pajak. Hingga akhirnya pemerintah akan mencapai titik optimalnya dalam melakukan pengeluaran pada titik T^* yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai pada titik g^* yang akan membentuk titik optimal C (Chao J & Grubel

H, 1998). Namun pada akhirnya hal tersebut akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, hal ini terjadi akibat dari peningkatan jumlah penerimaan pajak yang menyebabkan pemungutan atas tarif pajak yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan sektor swasta mengalami penurunan produktivitas (Bania N & Gray J.A, 2020).

Pada model pertumbuhan endogen juga terdapat eksternalitas yang dapat menciptakan *increasing returns to scale*. Hal ini dikarenakan adanya hipotesis yang mengemukakan bahwa investasi dalam pengetahuan akan meningkatkan skala pengembalian. Selain itu, menambah stok pengetahuan akan menciptakan barang publik dimana eksternalitas positif berasal. Misalnya, investasi dalam bidang R&D akan menghasilkan pengetahuan spesifik perusahaan yang digunakan untuk mengembangkan produk tertentu, dan juga meningkatkan stok pengetahuan tersebut, sehingga akan memungkinkan untuk pengembangan produk baru.

Kemunculan teori pertumbuhan endogen juga didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi Keynes yang lebih melihat bahwa pengeluaran pemerintah dapat mendorong perekonomian melalui mekanisme penyerapan kelebihan penawaran (Keynes, 1935). Selain itu teori Neo Klasik juga menjadi alasan mengapa teori pertumbuhan endogen ini muncul karena pada teori ini kebijakan fiskal pemerintah hanya dapat mempengaruhi pada jalur transisi ke kondisi mapan. Pertumbuhan ekonomi dalam kondisi mapan hanya dapat didorong oleh faktor eksogen dari pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi atau yang hanya mengandalkan faktor-faktor produksi saja dan tidak dapat dipertahankan secara terus menerus karena berlakunya hukum *low diminishing returns to capital*. Solow (1956) mengasumsikan bahwa kemajuan teknologi bersifat eksogen dimana ditentukan diluar faktor ekonomi, dan model neo klasik tidak memasukkan dampak eksternalitas ke dalam model.

2.1.1.2 Pajak Daerah

Di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. pajak daerah merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh seseorang atau badan usaha kepada daerah yang terutang dan mempunyai sifat memaksa sesuai undang-Undang. Pajak daerah tidak dapat memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi keperluan daerah guna mencapai kemakmuran masyarakatnya. Pajak daerah sebagai bagian dari salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting, terutama dalam mendukung bidang ekonomi.

Ciri-ciri pajak daerah menurut Mardiasmo (2010) sebagai berikut.

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah
2. Pembayaran atas pajak harus masuk kedalam kas negara
3. Untuk pembayaran pajak tidak akan mendapat kontraprestasi secara langsung dari pemerintah kepada pembayar pajak
4. Pajak dikenakan atas adanya suatu kejadian dan perbuatan menurut peraturan perundang-undangan yang dikenakan pajak

Menurut Diana S (2013) , Mahpudin, Suhono, Kosasih (2020) dan Direktorat jenderal pajak (2021) Pajak daerah memiliki fungsi untuk negara atau pemerintah antara lain:

- a. Fungsi anggaran (*Budgetair*), fungsi ini digunakan untuk mengisi kas daerah. Pada fungsi penerimaan dapat diartikan sebagai alat pemerintahan daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan dalam membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah digunakan untuk pembiayaan rutin seperti halnya belanja belanja barang & jasa, belanja pegawai dan belanja lainnya.
- b. Fungsi pengaturan (*Regulerend*), fungsi ini digunakan untuk mengatur

pajak daerah. Pajak daerah sebagai alat untuk mengatur investor luar negeri atau dalam negeri untuk menanamkan modalnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dapat membantu golongan dari masyarakat tertentu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Fungsi stabilitas, fungsi ini menganggap pajak memiliki peran penting dalam keseimbangan perekonomian. Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang memiliki hubungan dengan stabilitas harga, dan akhirnya membuat inflasi dan deflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi redistribusi pendapatan, pajak dapat berfungsi untuk membuka lapangan pekerjaan. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan yang bersifat umum, membiayai pembangunan sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pendapatan masyarakat.

2.1.1.3 Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah, maka retribusi daerah adalah pungutan daerah yang berasal dari masyarakat yang telah membayar retribusi atas pemberian izin dari pemerintah daerah atau untuk hal yang telah disediakan pemerintah daerah guna mendukung kegiatan dari orang secara pribadi dan badan usaha. Dengan banyaknya masyarakat yang akan membayar retribusi maka akan membuat masyarakat senantiasa dapat menikmati jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah secara langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menetapkan objek retribusi daerah juga tidak semua jenis jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi dapat dibuat

sebagai objek dari retribusi daerah.

Ciri-ciri retribusi daerah menurut Situmorang & Sitanggang (1994)

antara lain:

1. Retribusi dipungut oleh negara
2. Dalam proses pemungutan terdapat unsur paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang diberikan secara langsung kepada si pembayar
4. Setiap orang/badan akan dikenai pembayaran retribusi apabila menggunakan jasa-jasa yang sudah disediakan oleh negara.

Retribusi daerah memiliki fungsi bagi perekonomian antara lain :

- a. Sumber penerimaan pendapatan daerah.

Jika suatu daerah telah memiliki sumber penerimaan daerah untuk mampu memenuhi kebutuhan dari daerahnya, maka pemerintah pusat

akan tidak lagi memiliki beban untuk ikut membantu pembangunan di daerah

- b. Pengatur kegiatan perekonomian

Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar jika terdapat sumber-sumber keuangan pada daerah

- c. Stabilitas ekonomi di daerah

Retribusi daerah yang masuk dalam kas daerah akan membantu daerah untuk menstabilkan perekonomian di daerahnya, karena dengan retribusi daerah dapat mensokong pembiayaan yang diperlukan oleh pemerintah

- d. Pemerataan pembangunan

Jika suatu daerah telah memiliki retribusi daerah yang dapat diandalkan, maka dapat digunakan untuk melakukan pembangunan daerahnya.

2.1.1.4 Belanja Modal

Secara umum belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 mengenai standart akuntansi, belanja modal merupakan belanja oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya, yang memiliki manfaat melebihi dari satu tahun anggaran. Aset tetap dan aset lainnya ini mempunyai karakteristik yaitu aset ini berwujud, dapat menambah aset pemerintah daerah, memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran serta nilainya yang relatif material. Belanja dapat dikategorikan dalam belanja modal jika memenuhi karakteristik berikut ini :

1. Belanja tersebut menyebabkan perolehan aset tetap dan aset lainnya sehingga menambah aset pemerintahannya
2. Belanja tersebut melebihi batas minimal pada kapitalis aset tetap serta aset lainnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah
3. Dalam memperoleh aset tersebut tidak diniatkan untuk dijual

Belanja modal merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan kegiatan produktif dari pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga belanja ini tidak diperuntukkan bagi kalangan masyarakat secara perorangan atau rumah tangga namun bersifat publik karena di dalam pelaksanaannya bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka pemerintah daerah dianggap lebih produktif dalam melakukan belanjanya. Hal ini dikarenakan penggunaan daeri aset yang dihasilkan akan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik yang digunakan oleh masyarakat umum. Jika belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah meningkat maka pelayanan publik akan semakin meningkat begitupun ketika belanja modalnya menurun maka pelayanan publik di daerah akan tetap stagnan atau bahkan menurun.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belanja modal dibedakan menjadi lima kategori diantaranya :

- 1) Belanja modal tanah

Belanja yang mengeluarkan anggaran untuk keperluan pengadaan, pengosongan, pembuatan sertifikat, pembebasan tanah, penanganan balik nama serta pengeluaran lainnya yang memiliki hubungan untuk mendapatkan hak tanah

2) Belanja modal bangunan dan gedung

Belanja modal bangunan dan gedung adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan dan penambahan.

3) Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan, penggantian dan peningkatan dari kapasitas peralatan dan mesin yang dapat memberikan manfaat melebihi satu tahun anggaran dengan kondisi siap pakai untuk menunjang kegiatan daerah.

4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

Pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk melakukan pengadaan, peningkatan, pengantian, pembangunan, perawatan dan pembuatan yang didalamnya terdapat pengeluaran untuk melakukan perencanaan, kemudian pengawasan dan pengelolaan dari jalan, jaringan dan irigasi dalam kondisi yang siap pakai guna untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah

5) Belanja modal fisik lainnya

Pengeluaran dari anggaran yang digunakan untuk melakukan pengadaan, peningkatan, penambahan, pembuatan, perawatan terhadap aset fisik tersebut yang tidak dapat dimasukkan kedalam kategori.

Menurut Permendagri No 13 tahun 2006 belanja modal adalah komponen dari belanja langsung yang juga termasuk dalam belanja daerah dan dibiayai oleh pendapatan daerah. Besar kecilnya anggaran yang dapat dialokasikan dalam belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan daerah. Dalam

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan dana yang diberikan pemerintah pusat berupa dana perimbangan.

Belanja modal memiliki peranan untuk menunjang perekonomian baik secara mikro maupun makro. Pada umumnya pemerintah daerah melakukan pengadaan aset tetap pada setiap tahun sesuai dengan prioritas dari anggaran yang telah disusun serta menunjang pelayanan publik yang dapat menghasilkan dampak panjang secara finansial. Belanja modal dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya apabila dapat memenuhi lima kriteria antara lain tepat dalam mutu, tepat jumlahnya, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat harganya.

2.1.2 Pajak dan Retribusi Daerah dalam Otonomi Daerah

Secara umum otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk dapat mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya (Mariun, dalam Mulyanti D 2017). Dalam otonomi daerah pemerintah daerah sebagai penyedia barang dan jasa publik dianggap lebih efisien dibanding dengan pemerintah pusat dan masyarakat akan menjadi lebih sadar akan adanya biaya atas pelayanan (Khusaini,2018). Selain itu dalam otonomi daerah juga mengandalkan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah untuk melaksanakan pemerintahannya.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pajak dan retribusi daerah untuk digunakan dalam meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah dalam mendukung

otonomi daerah dianggap sebagai input untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah, pemasukan pada penerimaan daerah, menciptakan stabilitas pada kegiatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kemakmuran nyata bagi masyarakat daerah.

2.1.3 Belanja Modal dalam Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum belanja modal merupakan belanja untuk mendapatkan aset tetap atau aset daerah lainnya yang dapat memberikan manfaat melebihi dari dua belas bulan untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Belanja modal termasuk dalam belanja langsung selain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dari sarana dan prasarana, serta program dan kegiatan yang manfaatnya akan secara langsung dapat mendorong produktivitas masyarakat.

Belanja modal dapat digunakan untuk membeli aset tetap pemerintah daerah seperti infrastruktur, peralatan, serta aset tetap lainnya sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Belanja modal yang meningkat akan dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melakukan penambahan aset, pembangunan dan perbaikan untuk sektor-sektor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi seperti sektor transportasi, sektor jasa, sektor perdagangan dan sektor lainnya. Hal tersebut sesuai dengan teori keynes dalam Khusaini M (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah (belanja modal) dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pertumbuhan endogen oleh Barro (1990) juga menjelaskan akibat dari belanja produktif yang dilakukan pemerintah akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuncoro (2004) alokasi pada belanja modal memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

daerahnya. Sehingga daerah akan melakukan belanja modal yang sesuai dengan agenda sudah disusun untuk dapat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dibuktikan melalui penelitian di Ghana oleh Nyarko A Bhasin & Aglobitse (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menjadi peningkat bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu menurut Bose, Haque & Osborn (2003) yang melakukan penelitian di 30 negara berkembang pada dekade 1970-1980an juga menyatakan bahwa belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dan signifikan. Namun dalam hal ini penggunaan dana untuk belanja pemerintah harus dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah (Prasetya, F & Pangestuty, F, 2012).

2.1.3.1 Teori Keynes

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi keynes dipelajari oleh John Maynard Keynes dalam Jhingan (2003) menjelaskan bahwa pentingnya sektor pemerintah dalam perekonomian. Menurut Keynes pemerintah dianggap sebagai agen independen yang mampu menstimulasi perekonomian melalui kerja publik. Untuk menghindari kondisi yang stagnan pada perekonomian, pada teori ini memberikan solusi untuk melibatkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Hakim L, 2014). Menurut Olaoye, Orisadare & Okorie (2019) juga menyatakan bahwa pada teori keynes pemerintah memainkan peran utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai mesin dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori ini jumlah pengeluaran dari sektor pemerintah yang meningkat dalam hal ini yaitu belanja modal dapat dipergunakan untuk



melakukan pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Sehingga hal tersebut akan dapat mendorong permintaan barang dan jasa yang pada gilirannya akan direspon oleh produsen (masyarakat) untuk mengintensifkan faktor produksi yang mereka miliki dan akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan dan belanja masyarakat, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain dari pengeluaran sektor pemerintah, konsumsi dan investasi yang meningkat akan menyebabkan terjadinya kenaikan produksi barang dan jasa. Kenaikan yang terjadi pada produksi barang dan jasa inilah akan mengakibatkan peningkatan pada GDP. Dampak dari peningkatan yang terjadi pada GDP akan menyebabkan kenaikan pada pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan Keynes mengembangkan model makro ekonomi sebagai berikut.

$$Y = C + I + G$$

Keterangan

Y = Pendapatan nasional/GDP

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

2.1.4 Teori Pusat Pertumbuhan dalam Pembentukan Wilayah/Kawasan

Gerbangkertosusila (GKS)

Secara umum Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan mampu dijadikan sebagai pusat pembangunan. Ide awal mengenai teori pusat pertumbuhan dimulai dari teori kedudukan pusat yang dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933 dalam Fujita M, Krugman P & Venables (2001). Pada konsep yang disampaikan Christaller dia menggunakan bentuk segi enam atau hexagonal yang menunjukkan bawa garis

lurus merupakan jarak terdekat dan permukiman menuju pusat pertumbuhan. Dengan hal ini Christaller bermaksud agar orang yang ingin berbelanja dapat memilih tempat yang paling dekat dengan lokasi di sekitar tempat tinggalnya.

Pusat Pertumbuhan akan terus mempengaruhi pengembangan keterkaitan ke arah belakang di tingkat subregional dengan juga membangun ambang pasar yang dapat memicu keterkaitan ke depan agar dapat berkelompok satu sama lain. Pusat pertumbuhan ini dapat dianggap sebagai model perencanaan operasional, yang menggambarkan kondisi dimana pertumbuhan suatu wilayah dapat dijadikan faktor pemicu kenaikan pertumbuhan untuk wilayah lainnya. Pusat pertumbuhan biasanya telah dibentuk sesuai dengan Perundang-undangan di Provinsi setempat dengan melihat berbagai aspek yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah disekitarnya.

Seperti provinsi Jawa Timur yang membentuk Kawasan Gerbangkertosusilo (GKS) yang tercantum pada Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional.

Gerbangkertosusila (GKS) merupakan kawasan yang terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya dan Kota Mojokerto. GKS dibentuk dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pusat pelayanan di masing-masing SWP (Satuan Wilayah Pembangunan).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan penunjang dalam mengungkap permasalahan yang diangkat yakni mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, belanja modal serta

pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam memahami hubungan, pengaruh serta perbedaan antar variabel penelitian.

Penelitian dari Halim N , Kumenaung A & Engka D (2019) menganalisis besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal serta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Kota Manado tahun 2007–2015. Penelitian ini dianalisis dengan analisis jalur. Hasil dari penelitian mengemukakan secara langsung antara variabel pajak dan retribusi daerah tidak memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta secara tidak langsung variabel tersebut memiliki korelasi positif namun memiliki tingkat signifikansi yang masih rendah.

Menurut Mutiara D (2015) melakukan penelitian dengan menganalisis tentang pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal serta tingkat partisipasi pada angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2004–2013, penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pajak dan retribusi daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan , sedangkan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Tingkat partisipasi angkatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan namun negatif terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam jurnal yang meneliti mengenai pengaruh pajak, retribusi, pengeluaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta oleh Damaningrum (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Pada penelitian yang peneliti lakukan memperoleh hasil bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan, namun retribusi daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap



pertumbuhan ekonomi. Sementara pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.

Masela Y & Halim A (2011) pada penelitiannya yang menganalisis korelasi pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Malang 1999-2009. Dianalisis dengan metode korelasi. Hasil dari penelitian ini diperoleh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum mempunyai hubungan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rodriguez & Kroijer A (2018) dalam penelitiannya yang menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Eropa Tengah dan Timur tahun 1990–2004. Dengan menggunakan metode analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan transfer pemerintah berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pajak daerah yang semula ditetapkan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan menjadi berkorelasi positif dan signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Sufardi (2019) menganalisis mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nugraha I & Dwirandra (2016) menganalisis tentang kemampuan pertumbuhan ekonomi yang memoderasi pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009–2013. Dengan menggunakan metode analisis regresi moderated. Beberapa temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain pajak, retribusi daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi



berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sementara itu dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi variabel moderasi antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal, namun tidak dapat menjadi variabel moderasi antara dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal.

Subianto & Sipahutar F. Y (2020) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal secara simultan dan parsial di pemerintahan daerah Kota Lubuklinggau tahun 2015-2019. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Aspan H, Khaddafi M & Lestari I (2016) menganalisis mengenai efek dari adanya pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Kota Banda Aceh tahun 2006-2013. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Purba dkk (2018) melakukan penelitian dengan menganalisis mengenai pengaruh pajak, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan menggunakan total populasi sebagai variabel moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara di tahun 2014–2016.

Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menjelaskan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Jumlah populasi total mampu menjadi variabel moderasi untuk semua variabel terhadap belanja



modal.

Bai Junhong & Li Jing (2011) menganalisis efisiensi inovasi regional di China dan utamanya untuk menganalisis pengaruh pemerintah lokal dalam efisiensi inovasi daerah. Dengan menggunakan metode analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di pajak daerah digunakan untuk belanja modal dalam R&D dalam meningkatkan inovasi daerah. Namun efisiensi inovasi regional di China rendah dan peran dari pemerintah daerah belum dapat berjalan secara efektif dalam sistem inovasi regional China.

Fitri N & Putri S (2019) menganalisis mengenai besarnya pengaruh belanja pegawai dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia tahun 2008-2015. Dengan menggunakan analisis regresi & granger causality test. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. serta memiliki hubungan yang searah antara variabel tersebut.

Ibrahim F, Arham M & Abdul I (2018) juga menganalisis mengenai dana alokasi khusus, belanja modal dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Sulawesi di tahun 2007–2016. Dengan menggunakan metode analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bose N, Haque M & Osborn D (2003) menganalisis mengenai dampak dari pertumbuhan dengan adanya belanja modal di 30 negara berkembang pada tahun 1970–1980 dengan fokus pada pengeluaran sektoral. Dengan menggunakan metode analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa belanja modal pemerintah dalam produk domestik bruto (PDB) berkorelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja



modal untuk bidang pendidikan merupakan satu-satunya belanja sektoral yang secara signifikan terkait pertumbuhan ekonomi.

Humiang, Rimate & Tumangkeng S (2015) yang juga menganalisis mengenai pengaruh investasi swasta, belanja modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado pada tahun 2003–2012. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa dimana investasi swasta dan belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.



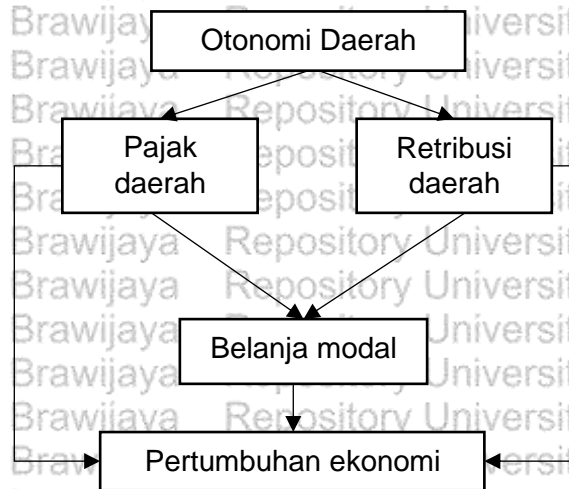
BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep penelitian dijelaskan melalui gambar 3.1 Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya pajak dan retribusi daerah yang mempengaruhi belanja modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian



Sumber : Penulis (2020)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan asas kemandirian dalam menjalankan pemerintahannya dengan memanfaatkan sumber daya daerah untuk dijadikan sebagai sumber keuangannya. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang muncul setelah upaya dari pemerintah untuk memanfaatkan sumber dayanya. Dengan adanya pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat dialokasikan untuk membiayai belanja modal guna untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah khususnya sarana dan prasarana serta pelayanan publik dalam menunjang kegiatan masyarakat. Belanja modal dapat menambah aset daerah dan dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk dapat menggerakkan roda

perekonomian. Hal tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan perkapita yang diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

3.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Secara teori bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan terhadap belanja modal sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pajak daerah merupakan salah satu pemasukan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pajak daerah yang tinggi digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah yaitu belanja modal. Semakin meningkatnya pajak daerah yang didapatkan, maka akan meningkat juga anggaran yang dapat dialokasikan untuk belanja modal. Menurut Nugraha I & Dwirandra (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Natoen A dkk (2020) dan Rahmawati R (2018) juga menjelaskan adanya hubungan positif antara pajak daerah terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan diatas sehingga hipotesis yang dapat dikembangkan yakni :

H1 = Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila.

3.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang dapat digunakan belanja modal. Retribusi daerah yang tinggi dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah yaitu belanja modal. Semakin meningkatnya retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, maka akan semakin meningkat juga anggaran yang dapat dialokasikan untuk belanja modal daerah. Menurut Situmorang & Sitanggang (1994) salah satu ciri-ciri dari retribusi daerah yaitu mendapatkan kontra prestasi secara langsung ketika masyarakat tersebut membayarkan retribusinya. Kontra prestasi yang diberikan tersebut dapat berupa barang, jasa dan pemberian izin atas suatu tempat yang terlebih dahulu sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah melalui pengalokasian belanja modal daerah. Maka dari itu retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat akan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis ini yaitu penelitian dari Periansya dkk (2020) & Nugraha I & Handayani (2015) dimana retribusi daerah berdampak positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dari penjelasan diatas sehingga hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu :

H2: Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila.

3.2.3 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pajak daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah. Penerimaan pajak daerah yang meningkat akan dapat digunakan untuk modal dalam melakukan pembangunan daerah sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi ada pada teori

pertumbuhan ekonomi endogen. Teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikemukakan oleh Barro (1990) pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan mengalokasikan pajak daerah untuk hal yang sifatnya produktif. Penelitian yang mendukung hipotesis ini adalah penelitian dari Rambe R & Febriani R (2020) dan Dewi J & Budhi M (2018) menjelaskan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H3: Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila.

3.2.4 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Retribusi daerah memberikan kontribusi dalam membiayai pembangunan yang dilakukan oleh daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penerimaan retribusi daerah yang tinggi akan dijadikan sebagai modal untuk dapat dialokasikan dalam pembangunan daerah sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pada daerah. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Barro (1990) pada teori pertumbuhan endogen yang menyatakan bahwa retribusi daerah yang digunakan untuk hal yang produktif akan menjadi kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Mutiara D (2015) & Sufardi (2015) juga menyatakan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan diatas sehingga hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H4: Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila.

3.2.5 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal merupakan salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan pembangunan daerah. Semakin besar dana yang digunakan untuk belanja modal pada pemerintah daerah maka akan membuat peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes di dalam penelitian oleh Hakim L (2014) yang menyatakan bahwa belanja modal di dalam penelitian ini yang dianggap sebagai pengeluaran dari pemerintah dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Olaoye, Orisadare & Okorie (2019) teori Keynes menganggap bahwa pemerintah memiliki peran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan peningkatan pengeluaran pemerintah. Dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah (belanja modal) yang akan dapat menambah pembelian atas barang dan jasa yang akan digunakan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat serta jumlah uang yang beredar. Sehingga hal ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian dari Waryanto (2016), Nurmainah S (2013) serta Ibrahim F dkk (2018) juga menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan diatas sehingga hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H5: Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila.

3.2.6 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Penerimaan dari pajak daerah yang meningkat akan dapat dialokasikan untuk belanja modal, sehingga aset tetap dan aset lainnya dapat bertambah.

Peningkatan aset tersebut yang akan mendukung kegiatan perekonomian masyarakat yang selanjutnya akan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Semakin besar penerimaan daerah (pajak daerah) yang diperoleh oleh pemerintah daerah maka dapat dialokasikan pemerintah daerah untuk belanja modal. Sehingga hal ini sesuai dengan pendapat dari Barro (1990) yang menyatakan bahwa pajak yang digunakan untuk belanja produktif akan dapat mendorong peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan diatas sehingga hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H6: Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila

3.2.7 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal

Penerimaan retribusi daerah yang tinggi maka akan dapat dialokasikan untuk belanja modal, sehingga aset tetap dan aset lainnya dapat bertambah.

Penambahan aset dari adanya belanja modal yang akan mendukung kegiatan perekonomian dari masyarakat daerah, sehingga akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Barro (1990) yang menyatakan bahwa retribusi daerah yang dialokasikan untuk belanja yang produktif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H7: Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Menurut Sujarweni (2015) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan penelitian dengan pendekatan kausal menurut Abdullah (2015) merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara variabel. Pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti diperlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel dari objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan yang terlepas pada konteks tempat, waktu dan situasi.

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian ini dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur. Pemilihan tempat ini berlandaskan bahwa Kawasan ini berada pada satuan wilayah (SWP), tujuan dari dibentuknya SWP ini adalah untuk pemerataan pembangunan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Waktu penelitian dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2014-2019 dikarenakan ketersediaan data yang dibutuhkan.

4.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi variabel bebas, variabel terikat dan variabel intervening. Variabel bebas adalah variabel

pajak daerah dan retribusi daerah, variabel terikat adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel intervening adalah variabel belanja modal. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh badan usaha dan individu tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan memiliki sifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah diindikasikan dengan menggunakan jumlah realisasi dari pajak daerah yang tersedia di setiap Kabupaten/Kota di Kawasan GKS pada tahun yang diteliti dalam satuan rupiah.
2. Retribusi daerah adalah pemungutan yang dilakukan oleh daerah atas pemberian izin dari fasilitas atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha. Retribusi daerah diindikasikan dengan menggunakan jumlah realisasi dari retribusi daerah yang tersedia di setiap Kabupaten/Kota di Kawasan GKS pada tahun yang diteliti dalam satuan rupiah.
3. Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk menambah atau memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat melebihi dalam satu tahun anggaran. Belanja modal diindikasikan dengan menggunakan jumlah realisasi dari belanja modal yang tersedia di setiap Kabupaten/Kota di Kawasan GKS pada tahun yang diteliti dalam satuan rupiah.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama masa periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan menggunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan pada setiap Kabupaten/Kota Kawasan GKS pada tahun yang diteliti dalam satuan rupiah.

4.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi pada beberapa wilayah dalam periode tertentu. Jenis data yang digunakan adalah jenis data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series* pada tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan beberapa data pendukung yang bersumber dari instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK) serta beberapa artikel, jurnal dan literatur terkait lainnya.

4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis menggunakan analisis jalur (*path analysis*), yang dikembangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel perantara (*intervening*). Dengan menggunakan data panel tidak diperlukan uji asumsi klasik karena pada data panel dapat meminimalkan bias yang kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis (Gujarati, 2012). *Path analysis* adalah pengembangan dari analisis regresi, analisis yang merupakan bentuk khusus dari analisis jalur. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan program IBM SPSS Statistics v.20 dan *sobel test calculator for the significance of meditation*.

4.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Silvia (2020) Analisis statistik deskriptif adalah analisis statistik yang mengumpulkan angka-angka dalam bentuk catatan dan untuk selanjutnya menyajikannya angka-angka tersebut dalam bentuk grafik untuk dianalisis dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan. Analisis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel

yang ada dalam penelitian. Ada dua parameter penting yang biasanya sering digunakan antara lain *central tendency* yaitu mean, modus dan median, selanjutnya yang kedua *dispersion* yaitu range, standar deviasi dan varians.

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif memberikan gambaran pada variabel-variabel penelitian yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), belanja modal (Z) dan pertumbuhan ekonomi (Y).

4.5.2 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis yang terdiri dari lebih dari satu variabel independen, satu variabel intervening, dan satu variabel dependen. *Path analysis* adalah teknik menganalisis hubungan dari sebab akibat yang terdapat pada regresi berganda yang apabila variabel independennya mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung terhadap variabel dependen.

Pengaruh tidak langsung ini diakibatkan adanya variabel intervening yang menjadi penengah diantara variabel tersebut. Variabel yang digunakan antara lain:

a. Variabel Dependen

Variabel yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian atau variabel yang ditentukan di dalam model dan diamati variasinya. Adapun variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y).

b. Variabel Perantara (*Intervening variable*)

Variabel yang berada diantara variabel terikat dan variabel bebas.

Sehingga variabel ini muncul sebelum variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Pada penelitian ini yang menjadi variabel perantara yaitu belanja modal (Z).

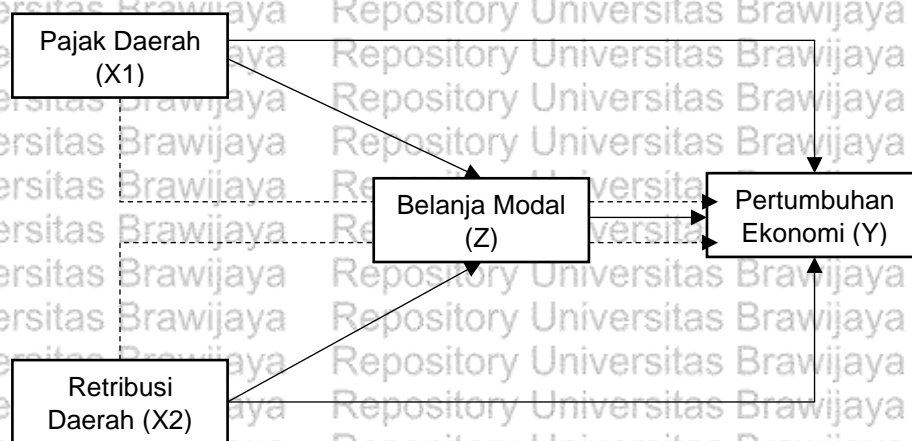


c. Variabel Independen

Variabel yang secara bebas berpengaruh terhadap variabel dependen dalam suatu model. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pajak daerah (X_1) retribusi daerah (X_2).

Berikut ini merupakan model analisis jalur yang dibentuk dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Model Analisis Jalur



Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dijabarkan sebagai berikut.

$$Z = a_1X_1 + a_2X_2 + e$$

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3Z + e$$

Keterangan :

Z = Belanja modal

Y = Pertumbuhan ekonomi

X_1 = Pajak daerah

X_2 = Retribusi daerah

e = Error term

a_1, a_2, a_3 = Koefisien dari masing-masing variabel.

4.5.3 Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik t dengan kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai probabilitas Sig lebih kecil ($0,05 \leq Sig$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan.
- 2) Apabila nilai probabilitas Sig lebih besar ($0,05 \geq Sig$) atau sama dengan nilai probabilitas Sig maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan.

b. Uji Sobel

Uji sobel merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan untuk melihat kekuatan pengaruh secara tidak langsung dari variabel independen (x) dengan variabel dependen (y) dengan melalui variabel intervening atau variabel mediasi (z) (Ghozali,2012). Pengujian dengan menggunakan uji sobel ini menggunakan aplikasi sobel test yaitu dengan *sobel test calculator for the significance of meditation*. Pengujian ini dilakukan secara online melalui <http://www.danielsoper.com>. Dengan melalui pengujian ini dapat diketahui apakah variabel intervening atau variabel mediasi dapat menjadi variabel intervening atau mediasi antara variabel independen terhadap variabel dependen atau dengan kata lain dapat mengetahui pengaruh secara tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan uji ini dapat dilihat nilai signifikansi yang baik dengan melihat *one tailed probability* maupun *two tailed probability* (Arumsasi, 2015). Didalam penelitian ini, uji sobel digunakan untuk mengetahui apakah variabel belanja modal dapat

menjadi variabel intervening antara pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya ada beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan uji sobel dalam menguji variabel intervening diantaranya penelitian dari Amalia, M., Widarko, A., & Hatneny, A. I. (2020) yang menguji kepuasan pelanggan kopi sebagai variabel intervening, adapun penelitian dari Binangkit, I. D. (2018) yang menggunakan beta saham menjadi variabel intervening serta penelitian dari Fajria, Z., Wahono, B., & Farida, E. (2021) yang menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel intervening.



BAB V

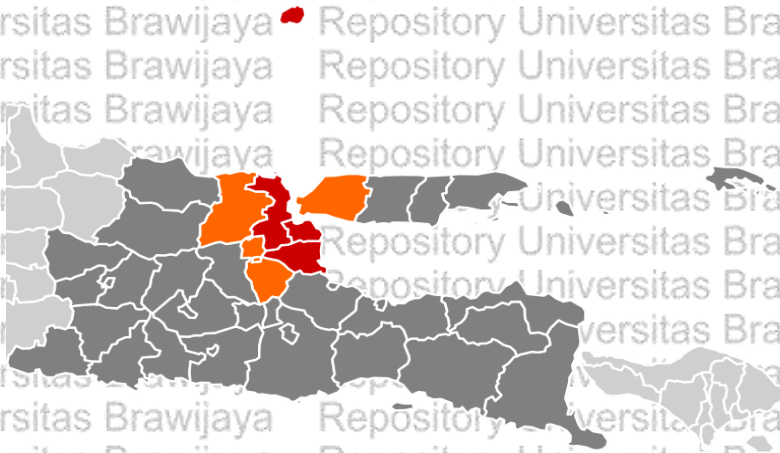
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur

Kawasan Gerbangkertosusila adalah suatu kawasan yang berada dalam Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam satuan wilayah pembangunan (SWP). Menurut Perda No. 2 tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur terdapat sembilan satuan wilayah pembangunan (SWP) yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan fungsi masing-masing di SWP tersebut. Kawasan Gerbangkertosusila dibentuk dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (dalam PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional dan Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996) tentang RTRW Nasional yang terdapat rencana atas pembentukan kawasan Gerbangkertosusila. Dalam pembentukan Kawasan Gerbangkertosusila memiliki fungsi untuk mengembangkan kegiatan perindustrian, perkebunan, peternakan, pertambangan, kehutanan, perikanan, jasa, pendidikan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, transportasi, kesehatan dan energi.

Kawasan Gerbangkertosusila memiliki luas wilayah di tahun 2019 sebesar 6,017,603 Km². Kawasan ini terdiri dari tujuh Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, yang menjadikan Kota Surabaya menjadi daerah nodal menjadi daerah inti (pusat) kegiatan ekonominya. Kawasan Gerbangkertosusila ialah pusat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kawasan Gerbangkertosusila memiliki 130 Kecamatan. Kawasan Gerbangkertosusila merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Kawasan Jabodetabek yang memiliki pusat di Jakarta. Adapun wilayah dari Kawasan GKS yang dapat di lihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1 Peta Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur



Sumber : Peta Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Secara Geografis Kawasan Gerbangkertosusila diantara semua Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Kawasan Gerbangkertosusila hanya Kabupaten Bangkalan yang berada diluar Pulau Jawa, Kabupaten Bangkalan terletak di Pulau Madura dan saat ini untuk menghubungkan kedua pulau tersebut telah dibangun jembatan suramadu yang memudahkan akses ke wilayah tersebut.

Kawasan Gerbangkertosusila memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Barat : Kabupaten Jombang
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh badan pusat statistik (BPS) tahun 2019 jumlah penduduk di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur pada tahun 2019 adalah sebesar 10.461.987 jiwa atau sekitar 26,35% dari jumlah penduduk di Jawa Timur. Adapun karakteristik dari masing-masing wilayah yang masuk dalam Kawasan Gerbangkertosusila antara lain :

5.1.1 Kabupaten Bangkalan

Kabupaten ini merupakan satu-satunya Kabupaten dari bagian

Kawasan GKS yang letaknya berada di luar pulau jawa yaitu di Pulau

Madura. Berdasarkan survei oleh BPS, Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.260,14 Km² dengan jumlah penduduk di tahun 2019 sebesar 1.076.330 jiwa. Kabupaten Bangkalan juga terletak diujung barat Pulau Madura yang menjadikannya sebagai pintu masuk utama untuk menuju ke wilayah lain di Pulau Madura, bahkan sekarang juga telah terdapat jembatan suramadu yang akan semakin mempermudah proses dari arus barang dan jasa serta investasi yang akan masuk ke wilayah madura. Menurut BPS Kabupaten Bangkalan, saat ini sektor yang mendukung perekonomian di kabupaten tersebut berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran.

5.1.2 Kabupaten Mojokerto

Kabupaten ini terletak diantara kabupaten Sidoarjo dengan Kota Batu. Menurut BPS Kabupaten Mojokerto mempunyai luas wilayah sebesar 692,15 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 1.159.593 jiwa. Kabupaten ini juga memiliki posisi yang strategis untuk akses ekspor import yaitu dengan berdekatnya dengan Bandara Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak serta adanya Tol Sumo yang menjadi akses untuk ke Surabaya. Kabupaten Mojokerto memiliki berbagai jenis potensi untuk dikembangkan antara lain banyaknya kawasan industri di Kabupaten tersebut seperti kawasan industri di Kecamatan Jetis, Ngoro serta Mojoanyar. Selain dari industri, Kabupaten ini juga memiliki beberapa potensi pariwisata seperti wisata air terjun, kolam air panas serta waduk. Berdasarkan BPS Kabupaten Mojokerto, sektor penyumbang terbesar di dalam perekonomian kabupaten ini berasal dari sektor pengolahan, kontruksi serta perdagangan besar dan eceran.

5.1.3 Kota Mojokerto



Kota ini merupakan kota yang mempunyai luas wilayah terkecil diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, dengan memiliki luas wilayah sebesar 20,21 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 129.014 jiwa. Kota ini dikenal dengan banyaknya masyarakat yang mengembangkan home industri seperti industri cetakan kue, industri batik tulis, industri pembuatan miniatur perahu layar serta industri lainnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, sektor yang menunjang perekonomian di Kota Mojokerto diantaranya ada dari sektor perdagangan besar dan eceran, sektor informasi dan komunikasi serta industri pengolahan.

5.1.4 Kabupaten Gresik

Kabupaten ini adalah kabupaten yang sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir yang memiliki luas wilayah sebesar 1.191,25 Km² dengan jumlah kepadatan penduduk sekitar 1.298.184 jiwa.

Kabupaten Gresik terletak berdekatan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang menjadikan kabupaten ini merupakan kawasan yang memiliki potensi yang berkembang pesat. Kabupaten Gresik juga dikenal dengan memiliki banyaknya wisata religius dan potensi alam. Selain itu menurut BPS Kabupaten Gresik, sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam menunjang perekonomian kabupaten ini berasal dari sektor pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta konstruksi.

5.1.5 Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten ini merupakan salah satu daerah penyangga dari Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah sekitar 714.243 Km² dengan kepadatan penduduk sekitar 2.266.533 jiwa. Kabupaten Sidoarjo juga memiliki potensi wisata seperti halnya wilayah lainnya yaitu wisata lumpur lapindo, wisata peninggalan dari kerajaan majapahit serta beberapa wisata alam lainnya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, sektor yang menunjang perekonomian di Kabupaten Sidoarjo berasal dari sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta sektor konstruksi.

5.1.6 Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang letaknya berada di pantai utara Jawa Timur yang sebagian besar kawasannya merupakan kawasan pesisir perbukitan. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 1.812,80 Km² dengan kepadatan penduduk sekitar 1.373.390 jiwa.

Kabupaten Lamongan juga memiliki beberapa potensi wisata seperti wisata alam, wisata religi serta wisata lainnya. Menurut BPS Kabupaten Lamongan, sektor yang menjadi penopang laju perekonomian daerah ini berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran serta konstruksi.

5.1.7 Kota Surabaya

Kota ini merupakan salah satu kota terbesar diantara kota lainnya di Indonesia. Kota Surabaya mempunyai luas wilayah sebesar 326,81 Km² dan jumlah penduduk sekitar 3.158.943 jiwa. Kota ini terletak diantara Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Kota Surabaya merupakan daerah inti dari kabupaten dan kota yang masuk dalam wilayah Kawasan GKS. Adapun menurut Badan Pusat Statistik, Kota Surabaya mempunyai sektor-sektor penyumbang perekonomian di kota tersebut yang berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Data yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun



2014-2019 dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik dari variabel seperti nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian yaitu pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Analisis deskriptif didalam penelitian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics v.20

1) Analisis statistik deskriptif variabel pajak daerah

Tabel 5.1 Analisis deskripsi variabel pajak daerah

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	42	16.97	22.11	19.3098	1.56518
Valid N (listwise)	42				

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui besarnya nilai pajak daerah berkisar antara 16.97 – 22.11 dengan nilai mean (rata-rata) sebesar 19.3098 dan standar deviasi 1.56518. Nilai mean sebesar 19.3098 memiliki arti bahwa tingkat efisiensi penggunaan pajak daerah dalam menghasilkan value added pada Kabupaten/Kota adalah sebesar 19.3098. Kabupaten/Kota yang memiliki nilai pajak daerah terendah dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bangkalan tahun 2014 sebesar 16.97. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan nilai pajak daerah tertinggi adalah Kota Surabaya tahun 2019 dengan nilai sebesar 22.11.

2) Analisis statistik deskriptif variabel retribusi daerah

Tabel 5.2 Analisis deskripsi variabel retribusi daerah

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Retribusi Daerah	42	15.85	20.14	17.6771	1.18739
Valid N (listwise)	42				

Sumber : data sekunder yang diolah,2021

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui besarnya nilai retribusi daerah berkisar antara 15.85 – 20.14 dengan nilai mean (rata-rata) sebesar 17.6771 dan standar deviasi sebesar 1.18739. Nilai mean sebesar 17.6771 memiliki arti bahwa tingkat efisiensi penggunaan retribusi daerah dalam menghasilkan value added pada Kabupaten/Kota adalah sebesar 17.6771. Kabupaten/Kota yang memiliki nilai retribusi daerah terendah dalam penelitian ini adalah Kota Mojokerto tahun 2017 sebesar 15.85. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan nilai retribusi daerah tertinggi adalah Kota Surabaya tahun 2017 dengan nilai sebesar 20.14.

3) Analisis statistik deskriptif variabel belanja modal

Tabel 5.3 Analisis deskripsi variabel belanja modal

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	42	18.60	21.74	20.0619	.76539
Valid N (listwise)	42				

Sumber : data sekunder yang diolah,2021

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui besarnya nilai belanja modal berkisar antara 18.60 – 21.74 dengan nilai mean (rata-rata) sebesar 20.0619 dan standar deviasi sebesar 0.76539. Nilai mean sebesar 20.0619 memiliki arti bahwa tingkat efisiensi penggunaan belanja modal dalam menghasilkan value added pada Kabupaten/Kota adalah sebesar 20.0619. Kabupaten/Kota yang memiliki nilai belanja modal terendah dalam penelitian ini adalah Kota Mojokerto tahun 2018 sebesar 18.60. Sedangkan

Kabupaten/Kota dengan nilai belanja modal tertinggi adalah Kota Surabaya tahun 2019 dengan nilai sebesar 21.74.

4) Analisis statistik deskriptif variabel pertumbuhan ekonomi

Tabel 5.4 Analisis deskripsi variabel pertumbuhan ekonomi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	42	22.05	26.74	24.5336	1.35386
Valid N (listwise)	42				

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui besarnya nilai pertumbuhan ekonomi berkisar antara 22.05 – 26.74 dengan nilai mean (rata-rata) sebesar 24.5336 dan standar deviasi sebesar 1.3586. Nilai mean sebesar 24.5336 memiliki arti bahwa tingkat efisiensi penggunaan pertumbuhan ekonomi dalam menghasilkan value added pada Kabupaten/Kota adalah sebesar 24.5336. Kabupaten/Kota yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi terendah dalam penelitian ini adalah Kota Mojokerto tahun 2014 sebesar 22.05. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Surabaya tahun 2019 dengan nilai sebesar 26.74.

5.2.2 Analisis Jalur (Path Analysis)

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau penggunaan analisis regresi untuk menaksirkan hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

1) Persamaan Regresi

Hasil analisis jalur dengan menggunakan IBM SPSS Statistics v.20 melalui dua tahap persamaan regresi. Persamaan regresi yang pertama dalam analisis jalur yaitu pengaruh dari pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2),

dan belanja modal (Z).

Sebagaimana dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$Z = a_1X_1 + a_2X_2 + e \quad \rightarrow \quad 1)$$

Berdasarkan hasil analisis jalur yang didapatkan, menghasilkan koefisien regresi pada tabel 5.5 berikut :

Tabel 5.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda dengan Belanja Modal sebagai variabel dependen

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.888 ^a	.789	.778	.36038

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.093	.897		11.249	.000
	Pajak Daerah	.052	.113	.107	.462	.647
	Retribusi Daerah	.507	.149	.786	3.391	.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan tabel 5.5 adalah

$$Z = 0,107 X_1 + 0,786 X_2 + e$$

$$\text{Nilai dari } e = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,789} = \sqrt{0,211} = 0,459$$

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Z = 0,107X_1 + 0,786X_2 + 0,459$$

Berdasarkan tabel 5.5 Diketahui hasil persamaan regresi analisis jalur pada tabel coefficients di atas menunjukkan bahwa :

- a. Koefisien regresi dari pajak daerah (X_1) sebesar 0,107 mempunyai arti bahwa apabila setiap peningkatan variabel pajak daerah sebesar satu, maka akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal (Z) sebesar 0,107 dengan catatan variabel retribusi daerah (X_2) tetap.

b. Koefisien regresi retribusi daerah (X_2) sebesar 0,786 yang memiliki arti bahwa apabila setiap peningkatan variabel retribusi daerah sebesar satu, maka akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal (Z) sebesar 0,786 dengan catatan variabel pajak daerah (X_1) tetap.

c. Nilai residual (error) variabel pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) terhadap belanja modal (Z) sebesar 0,459 atau 45,9%. Nilai ini merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Persamaan regresi yang kedua dalam analisis jalur ini adalah pengaruh dari pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), belanja modal (Z) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Persamaan yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3Z + e \quad \rightarrow \quad 2)$$

Berdasarkan hasil analisis jalur yang didapatkan menghasilkan koefisien regresi pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Dependen

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.969 ^a	.940	.935	.34473

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------



	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.645	1.768		.930	.358
1 Pajak Daerah	.398	.109	.461	3.663	.001
Retribusi Daerah	.303	.163	.265	1.860	.071
Belanja Modal	.491	.153	.278	3.205	.003

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Data sekunder yang diolah , 2021

Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan tabel 5.6 adalah :

$$Y = 0,461 X_1 + 0,265 X_2 + 0,278 Z + e$$

$$\text{Nilai } e = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,940} = \sqrt{0,060} = 0,244$$

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Y = 0,461 X_1 + 0,265 X_2 + 0,278 Z + 0,244$$

Berdasarkan tabel 5.6 diketahui bahwa hasil persamaan regresi analisis

jalur pada table coefficients diatas menunjukkan bahwa :

- Koefisien regresi pajak daerah (X_1) sebesar 0,461 mempunyai arti bahwa apabila setiap peningkatan variabel pajak daerah sebesar satu, maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,461 dengan catatan variabel retribusi daerah (X_2) dan belanja modal (Z) tetap.
- Koefisien regresi retribusi daerah (X_2) sebesar 0,265 yang memiliki arti bahwa apabila setiap peningkatan variabel retribusi daerah sebesar satu, maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,265 dengan catatan variabel pajak daerah (X_1) dan belanja modal (Z) tetap.
- Koefisien regresi belanja modal (Z) sebesar 0,278 yang memiliki arti bahwa apabila setiap peningkatan variabel belanja modal sebesar satu, maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,278 dengan catatan variabel pajak daerah (X_1)

dan retribusi daerah (X_2) tetap

d. Nilai residual (error) variabel pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan belanja modal (Z) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,244 atau 24,4%. Nilai ini merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

2) Total Pengaruh

Besarnya pengaruh secara langsung dari variabel pajak daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) adalah 0,461 atau 46,1%. Besarnya pengaruh secara tidak langsung variabel pajak daerah terhadap belanja modal (Z) adalah $0,107 \times 0,278 = 0,029$ atau 2,9%. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa total pengaruh langsung yang diberikan pajak daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dan ditambah dengan pengaruh secara tidak langsung melalui belanja modal (Z) sebesar $0,461 + 0,029 = 0,49$ atau 49%.

Besarnya pengaruh secara langsung dari variabel retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 0,265 atau 26,5%. Besarnya pengaruh secara tidak langsung variabel retribusi daerah (X_2) terhadap belanja modal (Z) adalah $0,786 \times 0,278 = 0,218$ atau 21,8%. Sehingga total pengaruh secara langsung yang diberikan retribusi daerah (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dan ditambah dengan pengaruh secara tidak langsung melalui belanja modal (Z) adalah $0,265 + 0,218 = 0,483$ atau 48,3%. Jadi nilai ini merupakan pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari variabel yang diteliti, sedangkan nilai sisanya berpengaruh terhadap variabel lain yang tidak diteliti.

5.2.3 Pengujian Hipotesis

1) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Secara parsial model regresi pertama dapat diuji signifikansi dengan

menggunakan uji t dan dapat dilihat pada tabel 5.7 sebagai berikut.

Tabel 5.7 Hasil Uji t dengan belanja modal sebagai Variabel Dependen

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.093	.897		11.249	.000
	Pajak Daerah	.052	.113	.107	.462	.647
	Retribusi Daerah	.507	.149	.786	3.391	.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data penelitian diolah , 2021

1) Pengujian hipotesis 1 (H1)

Berdasarkan tabel 5.7 hasil analisis statistik dengan menggunakan IBM SPSS Statistics v.20 maka pada variabel pajak daerah (X_1) diperoleh nilai t hitung = 0.462 dengan nilai signifikansi = 0,647 > 0,05. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Oleh karena itu H1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh pajak daerah secara positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur **ditolak**.

2) Pengujian hipotesis (H2)

Berdasarkan tabel 5.7 hasil analisis statistik dengan menggunakan IBM SPSS Statistics v.20 maka pada variabel retribusi daerah (X_2) diperoleh nilai t hitung = 3,391 dengan nilai signifikansi = 0,002 < 0,05. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Oleh karena itu H2 yang menyatakan bahwa ada pengaruh retribusi daerah secara positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur **diterima**.

Tabel 5.8 Hasil Uji t dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel
Dependen

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.645	1.768		.930	.358
Pajak Daerah	.398	.109	.461	3.663	.001
Retribusi Daerah	.303	.163	.265	1.860	.071
Belanja Modal	.491	.153	.278	3.205	.003

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Data penelitian diolah, 2021

3) Pengujian hipotesis 3 (H3)

Berdasarkan tabel 5.8 hasil analisis statistik dengan menggunakan IBM SPSS Statistics v.20 maka pada variabel pajak daerah (X_1) diperoleh nilai t hitung = 3,663 dengan nilai signifikansi = 0,001 < 0,05. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu H3 yang menyatakan bahwa ada pengaruh pajak daerah secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur **diterima**.

4) Pengujian hipotesis 4 (H4)

Berdasarkan tabel 5.8 hasil analisis statistik dengan menggunakan IBM SPSS Statistics v.20 maka pada variabel retribusi daerah (X_2) diperoleh nilai t hitung = 1,860 dengan nilai signifikansi = 0,071 > 0,05. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu H4 yang menyatakan bahwa ada pengaruh retribusi daerah secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur **ditolak**.

5) Pengujian hipotesis (H5)

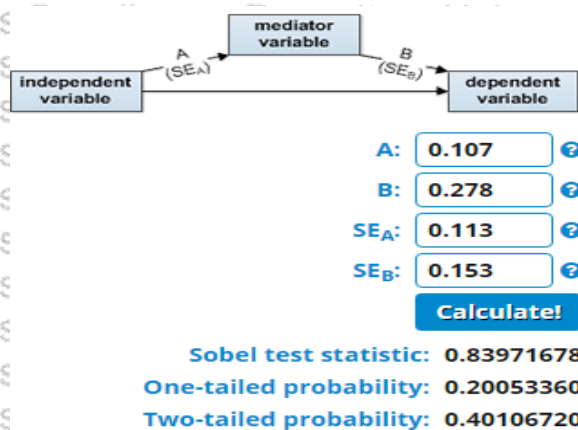
Berdasarkan tabel 5.8 hasil analisis statistik dengan menggunakan IBM SPSS Statistics v.20 maka pada variabel belanja modal (Z) diperoleh nilai t hitung = 3,205 dengan nilai signifikansi = 0,003 < 0,05. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu H5 yang menyatakan bahwa ada pengaruh belanja modal secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur diterima.

2) Uji Sobel

Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan dari pengaruh tidak langsung variabel independen kepada variabel dependen melalui variabel intervening.

Perhitungan uji sobel melalui aplikasi *sobel test calculation for significance for Meditation* maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Gambar 5.2 Hasil Sobel Test Pajak Daerah

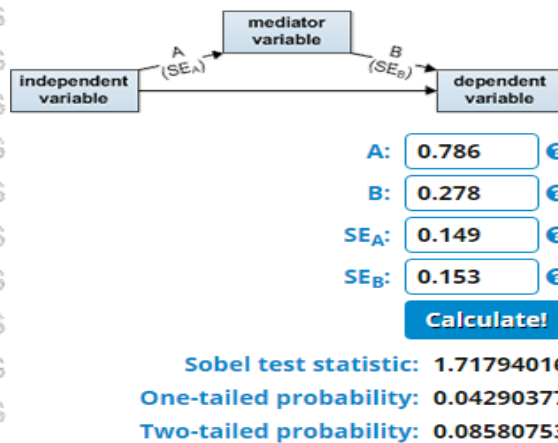


Sumber : Data penelitian diolah , 2021

6) Pengujian hipotesis 6 (H6)

Berdasarkan hasil uji sobel pada gambar 5.1 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar $0,839 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,68$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut variabel belanja modal (Z) bukan merupakan variabel intervening antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis (H6) yang menyatakan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur **ditolak**.

Gambar 5.3 Hasil Sobel Test Retribusi Daerah



Sumber : Data penelitian diolah , 2021

7) Pengujian hipotesis 7

Berdasarkan hasil uji sobel dari gambar 5.2 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar $1,717 > \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,68$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,042 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut variabel belanja modal (Z) merupakan variabel intervening antara retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis (H7) yang menyatakan bahwa Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur **diterima**.

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan menjelaskan hubungannya melalui variabel intervening. Dengan menggunakan analisis path dan aplikasi *sobel/ test calculation for significance for Mediation* yang juga telah diuji dalam penelitian ini telah diperoleh hasilnya secara keseluruhan. Sebagaimana yang bisa diamati dalam tabel 5.9 ringkasan hasil pengujian hipotesis. Berikut merupakan pembahasan hasil penelitian dan penemuan penelitian yang dapat diungkapkan pada penelitian ini.

5.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Di dalam penelitian ini hipotesis yang mengemukakan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila ditolak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa pajak daerah di Kawasan Gerbangkertosusila berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal ini memiliki arti bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang searah namun pengaruh yang diberikan kecil maka dianggap tidak signifikan terhadap belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan fungsi pajak daerah yang dikemukakan oleh Diana S (2013) , Mahpudin, Suhono, Kosasih (2020) pada fungsi anggaran pada pajak daerah yaitu *budgetair* yang menyatakan bahwa pajak daerah digunakan untuk mengisi kas daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja rutin lainnya. Menurut Direktorat Jendral Pajak (2021) juga menyatakan bahwa pajak daerah baru-baru ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang , pemeliharaan serta pengeluaran lainnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka pajak daerah masih belum dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan atas belanja modal untuk daerah. Maka dari itu pajak daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah sebagian besar masih dipergunakan untuk pembiayaan rutin atas pemeliharaan atau penyelenggaraan aktivitas pemerintah sehari-hari seperti untuk belanja atas barang dan jasa, belanja pegawai serta pengeluaran rutin lainnya. Selain itu penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah dari penerimaan daerah yang berasal dari daerahnya sendiri seperti pajak daerah, hal tersebut menyebabkan pajak daerah belum dapat signifikan terhadap belanja modal.

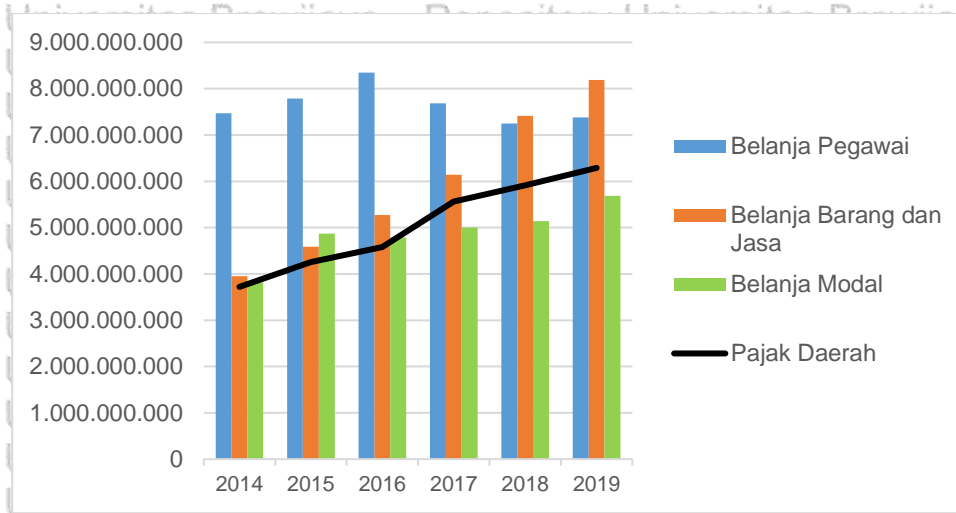
Hasil dari penelitian ini juga didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Subianto & Sipahutar Ferry Y (2020) yang mengemukakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintahan daerah Kota Lubuklinggau pada tahun 2015–2019. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kota Lubuklinggau dikarenakan jumlah pajak daerah yang terlalu rendah. Mamonto S.Y , Kalangi & Tolosang (2015) juga menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pajak daerah yang terlalu rendah juga menjadi permasalahan mengapa belum bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan atas belanja modal yang penting di daerah. Penelitian dari Handayani, Abdullah & Fahlevi (2015) juga mengemukakan bahwa pajak daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tidak berpengaruh terhadap belanja modal, yang diakibatkan karena pajak daerah yang diperoleh tidak meningkatkan alokasi untuk belanja modal yang justru dana bagi hasil yang berpengaruh pada peningkatan alokasi belanja modal.

Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudika I & Budiarta (2017) yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki



pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Bali pada tahun 2010–2014 dan penelitian dari Rahmawati R (2018) yang juga menyatakan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta pada tahun 2012–2016. Hal tersebut terjadi karena pajak daerah sebagai penyumbang dalam keuangan daerah telah memiliki peranan yang penting untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah termasuk belanja modal.

Gambar 5.4. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa & Pajak Daerah Kawasan GKS (2014-2019)



Sumber : DPJK, 2021 (data diolah)
Di Kawasan Gerbangkertosusila pajak daerah meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Pajak daerah masih lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dibandingkan dengan belanja modal seperti yang terlihat pada gambar 5.3. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Sundika & Budiarta (2017) yang menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih banyak menggunakan pendapatan daerahnya yang termasuk pajak ke dalam belanja rutin (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa). Meskipun belanja pegawai mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun belanja tersebut mendapatkan proporsi anggaran daerah lebih banyak jika dibandingkan dengan belanja modal. Selain itu belanja barang dan jasa juga memiliki proporsi anggaran

lebih banyak jika dibandingkan dengan belanja modal.

5.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis dalam penelitian ini mengemukakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila telah diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa retribusi daerah di Kawasan Gerbangkertosusila berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat penerimaan retribusi daerah, maka belanja modal juga akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila penerimaan retribusi daerah ini semakin menurun, maka belanja modal juga akan semakin menurun.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan ciri-ciri dari retribusi daerah menurut Situmorang & Sitanggang (1994) yang menyatakan bahwa terdapat kontra prestasi secara langsung yang dapat dinikmati yang berupa pemberian izin atau layanan jasa tertentu. Kontraprestasi tersebut dapat diperoleh dengan pengalokasian retribusi daerah melalui belanja modal, seperti retribusi atas pelayanan pelabuhan dan retribusi pasar yang membutuhkan pembebasan/pembelian/pengadaan atas tanah yang akan digunakan. Jadi untuk memperoleh tanah tersebut perlu melakukan belanja modal. Maka dengan adanya retribusi daerah dapat memberikan dampak pada belanja modal.

Retribusi daerah yang berpengaruh pada belanja modal juga sesuai dengan teori ekonomi pada keuangan negara yang membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang didasarkan pada aspek semangat undang-undang pada otonomi daerah yang salah satu memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian fiskal daerah (Wahyudi M & Handayani, 2015). Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi daerah. Jika retribusi daerah ini meningkat, maka hal tersebut akan meningkatkan

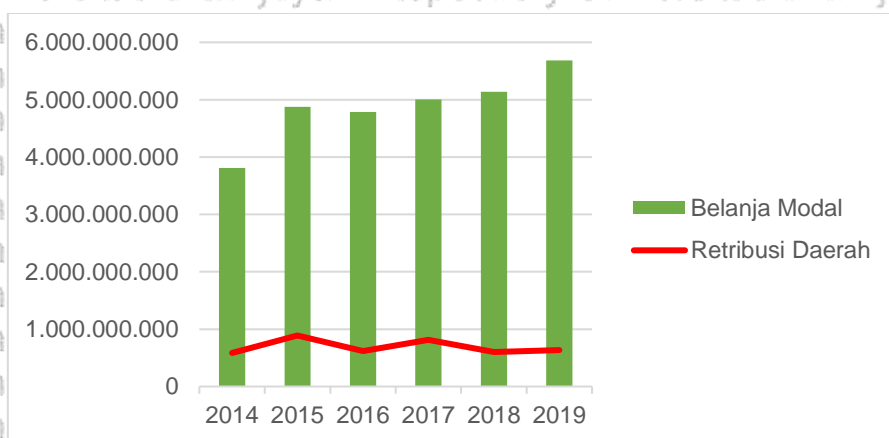


pendapatan asli daerah yang akhirnya dapat digunakan untuk dialokasikan pada belanja modal.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Periansya dkk (2020) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015–2019. Nugraha I & Dwirandra A (2016) juga menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2009–2013. Retribusi daerah yang diterima mengalami peningkatan dan akan membuat semakin tinggi pengalokasian dana untuk belanja modal oleh daerah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati R (2018) yang mengemukakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal, dan penelitian dari Subianto & Sipahutar F (2020) yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal di Kota Lubuklinggau tahun 2015–2019. Hal ini dapat terjadi karena jumlah dari penerimaan retribusi daerah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya, sehingga tidak dapat berdampak secara signifikan terhadap belanja modal di daerah.

Gambar 5.5 Belanja Modal & Retribusi Daerah Kawasan GKS (2014-2019)



Sumber : DPJK, 2021 (data diolah)

Pada Kawasan Gerbangkertosusila retribusi daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2014 hingga tahun 2019, dan diikuti oleh belanja modal yang juga ikut mengalami fluktuasi seperti yang terlihat pada gambar 5.4. Retribusi daerah yang memberikan dampak positif serta signifikan terhadap belanja modal membuktikan bahwa retribusi daerah telah dipergunakan untuk belanja modal oleh pemerintah daerah di Kawasan Gerbangkertosusila. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi M & Handayani (2015) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di 6 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2009–2013. Dengan banyaknya jenis usaha dan berbagai aktivitas yang membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah di Kawasan Gerbangkertosusila akan mendorong untuk lebih banyak pemungutan atas retribusi daerah. Dengan begitu pemerintah daerah dapat mengalokasikan retribusi daerah untuk belanja modal yang digunakan untuk menambah aset tetap atau aset lainnya yang berguna untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanan publik, guna untuk memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat yang membayarkan retribusi.

5.3.3 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila telah diterima. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran pajak daerah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Sebaliknya jika apabila pajak daerah ini semakin menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin menurun. Serta pengaruh dari pajak daerah yang diberikan besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara pajak daerah yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari dukungan teori pertumbuhan endogen

oleh Barro (1990) yang menyatakan bahwa jika pajak daerah dipergunakan untuk hal yang bersifat produktif maka akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bania, N., Gray, J. A., & Stone, J. A (2007) yang mengemukakan bahwa pemungutan dari pajak akan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan apabila dipergunakan untuk membeli hal yang memiliki sifat produktif. Jika pemerintah daerah dapat mengelola pajak daerah secara optimal yang dipergunakan untuk mendukung sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian daerah tersebut misalnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, maka akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini dapat menjelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka dibutuhkan peran dari pajak daerah dalam pembiayaannya.

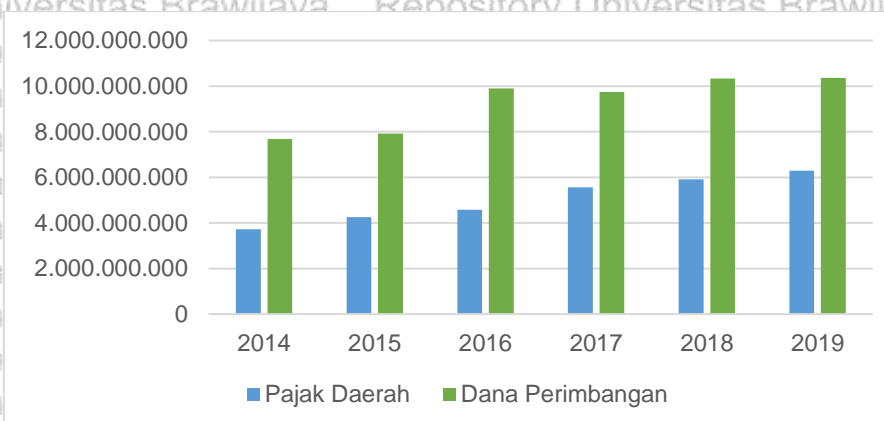
Pada era otonomi daerah yang berlangsung sudah cukup lama, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan menggali sumber pendapatan daerahnya seperti pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah dapat diakumulasikan dalam bentuk modal untuk membiayai sarana dan prasarana publik yang digunakan untuk menunjang kegiatan perekonomian. Dari kegiatan perekonomian tersebut akan menjadi titik awal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya pajak daerah yang digunakan maka akan semakin meningkat juga pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Rodriguez & Kroijer (2009) yang menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Eropa Tengah dan Timur tahun 1990–2004. Pemerintah daerah yang memiliki sumber pendapatannya daerahnya sendiri telah dapat merespon permintaan daerah

dengan lebih baik dan mendorong efisiensi ekonomi yang lebih besar. Hal serupa juga terdapat pada penelitian dari Rambe R & Febriani R (2020) menyatakan pajak daerah memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Pulau Sumatera tahun 2011–2016. Dan Penelitian dari Dewi J & Budhi M (2018) juga menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1996–2016.

Sementara itu penelitian dari Ibrahim, Asmawati & Adamy Y (2019) mengemukakan hasil yang berbeda, yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penelitian Mina M & Ratna (2020) yang juga menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan teori Keynes dalam Soewardi T, Ananda C & Erlando A (2018) yang menyatakan bahwa pajak daerah yang tinggi justru akan dapat membuat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Pemungutan pajak daerah yang tinggi akan dapat mengurangi pendapatan masyarakat untuk disposable income sehingga akan mengurangi konsumsi dari masyarakat. Dengan berkurangnya konsumsi dari masyarakat akan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2007).

Gambar 5.6 Pajak Daerah & Dana Perimbangan Kawasan GKS (2014-2019)



Sumber: DPJK, 2021 (data diolah)

Meskipun pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pajak daerah tidak membuat laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila ikut meningkat. Transfer pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pajak daerah menjadi salah satu alasannya (gambar 5.5). Hal tersebut juga sesuai pernyataan dari Khusaini M (2007) yang menyatakan bahwa di Kabupaten/Kota Jawa Timur mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pajak daerah (*taxing power*). Pemerintah daerah mendapatkan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak. Jika jumlah dari pajak daerah sama tinggi jumlahnya dengan transfer dari pemerintah pusat, hal tersebut mampu membuat pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang stabil. Namun meskipun begitu pajak daerah yang meningkat dari tahun ke tahun sudah dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari pemerintah daerah sudah cukup baik untuk membiayai pemerintahannya sendiri meskipun pengalokasiannya masih untuk hal yang kurang produktif.

5.3.4 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

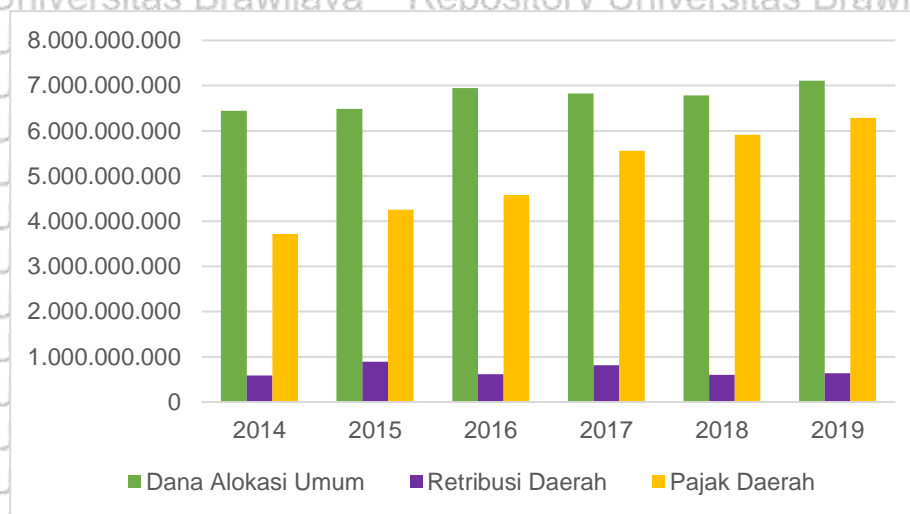
Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila telah ditolak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa retribusi daerah di Kawasan Gerbangkertosusila berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memiliki arti bahwa retribusi daerah yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah di Kawasan Gerbangkertosusila.

Dengan adanya hasil dari penelitian ini maka bertolak belakang dengan teori pertumbuhan endogen oleh Barro (1990) yang menyatakan bahwa retribusi daerah yang dialokasikan untuk hal yang produktif akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini penerimaan dari retribusi daerah masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pajak daerah, sehingga belum mencukupi untuk digunakan dalam membiayai sektor-sektor yang menunjang perekonomian. Maka dari itu retribusi daerah di Kawasan Gerbangkertosusila masih belum mampu untuk digunakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang mendukung hasil dari penelitian ini yaitu penelitian Mononimbar Walewangko & Sumual (2017) yang menyatakan bahwa di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2005–2014 retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Ibrahim, Asmawati & Adamy (2019) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten / Kota Provinsi Aceh tahun 2014–2017.

Dari hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara D (2015) yang mengemukakan bahwa retribusi daerah justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004–2013 dan penelitian dari Sufardi (2019) juga menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai. Hal tersebut terjadi karena retribusi daerah meningkat dan pemerintah daerah secara tegas untuk menarik retribusi daerah, sehingga retribusi daerah dapat berkontribusi dalam pendapatan daerah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Gambar 5.7 Dana alokasi umum, Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kawasan GKS (2014-2019)



Sumber : DPJK, 2021 (data diolah)

Jika dilihat pada gambar 5.6 tidak berpengaruhnya retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila dikarenakan masih rendahnya retribusi daerah yang diperoleh, sehingga dana yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada dana alokasi umum (DAU) yang berasal dari pendapatan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pajak daerah.

5.3.5 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila telah diterima. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran belanja modal, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Sebaliknya jika apabila belanja modal ini semakin menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin menurun.

Hubungan antara belanja modal yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari dukungan teori pertumbuhan ekonomi keynes yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes seperti yang terdapat pada penelitian Olaoye, O.O, Orisadare & Okorie (2014) yang menjelaskan bahwa

pengeluaran pemerintah yang meningkat dalam hal ini belanja modal akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan memiliki peran yang utama pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam teori ini pengeluaran pemerintah (belanja modal) merupakan mesin pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal dibiayai oleh pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin tingginya anggaran pendapatan daerah yang dialokasikan untuk belanja modal maka akan semakin meningkat juga jumlah aset tetap dan aset lainnya sebagai penunjang untuk aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan penambahan aset-aset daerah dan mencukupi maka akan menciptakan efektivitas dan efisiensi pada pelayanan publik yang lebih baik dan daerah akan memiliki kekuatan untuk mampu menggerakkan roda perekonomian. Secara tidak langsung hal tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu dari adanya peningkatan pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja modal akan diikuti dengan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah daerah, sehingga hal tersebut akan mendorong produsen yaitu masyarakat daerah tersebut untuk mampu menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan oleh konsumen yaitu pemerintah daerah. Hal tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan dan belanja masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

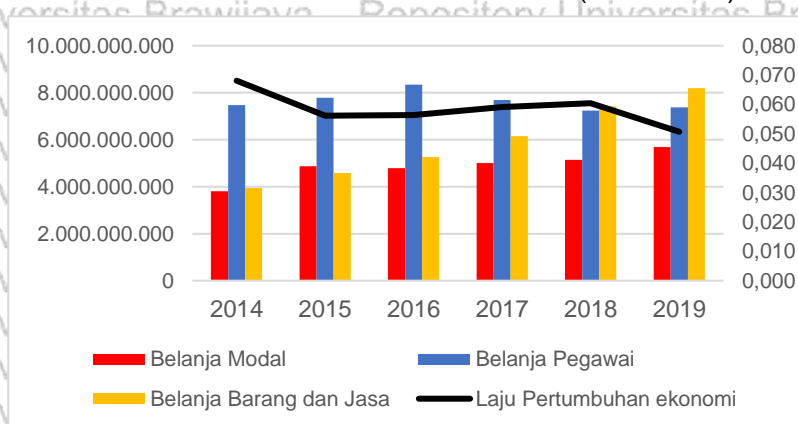
Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Ibrahim F, Arham M. & Abdul I (2018) yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Sulawesi. Belanja modal yang digunakan untuk pengadaan infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penelitian lain yang memiliki hasil yang



sama juga dilakukan oleh Waryanto (2016) juga menyatakan di Indonesia, belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Nurmainah S (2013) juga menyatakan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 – 2012. Selain itu penelitian di Ghana oleh Nyarko, Bhasin & Aglobitse (2019) juga menyatakan bahwa belanja modal oleh pemerintah daerah akan dapat menjadi peningkat untuk pertumbuhan ekonomi.

Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Humiang M, Rumat V & Tumangkeng S (2015) pada penelitiannya menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado dan penelitian dari Mukarramah, Yolanda C & Zulkarnain M (2019) yang juga menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2005–2015. Hal tersebut terjadi karena masih kurang tepatnya pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dalam pengalokasian belanja modal, sehingga belanja modal yang sudah ada belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gambar 5.8 Belanja Modal, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa & Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan GKS (2014-2019)



Sumber: DPJK, 2021 (data diolah)

Jika dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun jika dilihat pada gambar 5.7 diketahui bahwa belanja modal jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa di Kawasan Gerbangkertosusila. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sundika & Budiarta (2017) yang menyatakan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memilih untuk mengalokasikan pendapatannya dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa daripada belanja modal. Meskipun dari hasil penelitian belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun jika dilihat dari faktanya pertumbuhannya tetap menurun. Penerimaan daerah yang seharusnya dapat dialokasikan dalam belanja modal, justru masih dipergunakan untuk belanja yang sifatnya rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sehingga belanja modal belum dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

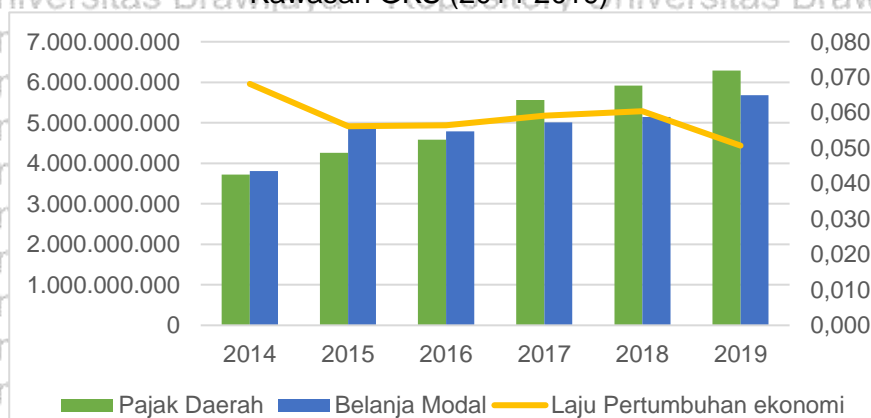
5.3.6 Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur telah ditolak. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Pajak daerah secara parsial memberikan pengaruh secara langsung secara positif dan signifikan, namun secara tidak langsung dengan melalui belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memiliki arti bahwa belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening secara sempurna pada pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan dari pajak daerah dengan diikuti oleh peningkatan atau penurunan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Barro (1990) yang disampaikan dalam teorinya yaitu teori pertumbuhan endogen, yang menyatakan bahwa pajak daerah yang digunakan untuk belanja produktif (belanja modal) akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena pajak daerah yang meningkat sebagian besar masih digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti untuk belanja pegawai, belanja atas barang dan jasa serta pengeluaran rutin lainnya untuk melaksanakan kegiatan dan program-program dari pemerintah daerah. Sehingga pajak daerah belum bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui belanja modal. Selain itu menurut penelitian dari Halim N , Anderson K & Engka D (2019) menyatakan pembiayaan untuk daerah masih didominasi oleh transfer yang berasal dari pemerintah pusat bukan dari pendapatan asli daerah yang mengakibatkan penerimaan dari pajak daerah belum memberikan pengaruh yang signifikan untuk dialokasikan dalam belanja modal sehingga belum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kota Manado tahun 2007–2015.

Gambar 5.9 Pajak Daerah, Belanja Modal & Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan GKS (2014-2019)



Sumber : BPS & DPJK , 2021 (data diolah)

Di Kawasan Gerbangkertosusila peningkatan yang terjadi pada pajak daerah membuat belanja modal juga mengalami peningkatan, namun hal itu tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi seperti yang terlihat pada gambar 5.8.

Pemerintah daerah setempat sebagian besar masih mengalokasikan pajak daerah untuk belanja rutin bukan untuk belanja modal. Meskipun belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila meningkat namun peningkatan ini tidak disebabkan dari pajak daerah melainkan dari pendapatan daerah lainnya.

5.3.7 Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur

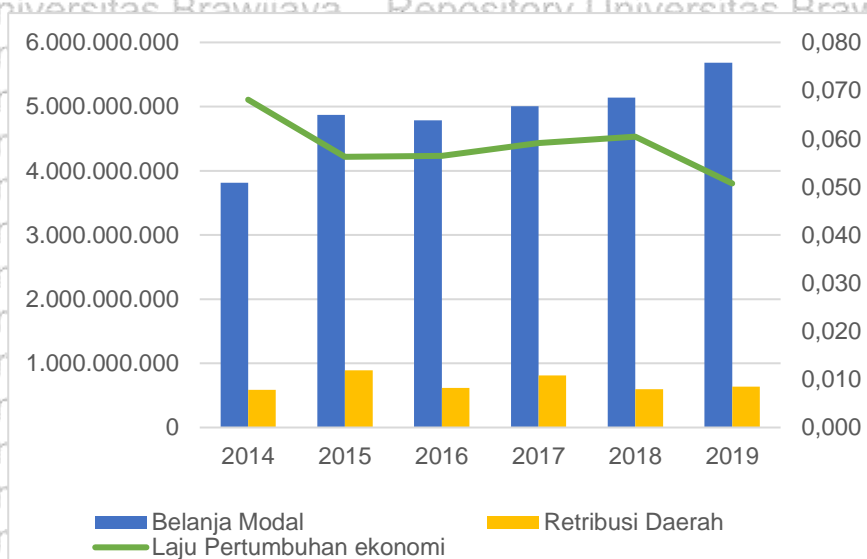
Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila Jawa Timur telah diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Retribusi daerah secara parsial tidak dapat memberikan pengaruh secara langsung, namun secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memiliki arti bahwa belanja modal dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta retribusi daerah tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa melalui variabel intervening.

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan dari retribusi daerah dengan diikuti oleh peningkatan atau penurunan belanja modal yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan endogen dari Barro (1990) yang menyatakan bahwa apabila retribusi daerah digunakan untuk belanja yang sifatnya produktif (belanja modal) dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pemungutan dan dikelola oleh pemerintah daerah

menunjukkan pengaruh yang baik untuk dialokasikan dalam meningkatkan belanja modal, sehingga belanja modal dapat digunakan untuk menambah aset daerah.

Dengan ketersediaan aset daerah yang baik dan mencukupi seperti infrastruktur, akan menciptakan kondisi efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan pada berbagai sektor perekonomian seperti sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dari penelitian yang dilakukan oleh Halim N, Kumenaung A & Engka D.S (2019) di Kota Manado yang menyatakan retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan melalui belanja modal sehingga tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 5.10 Retribusi Daerah, Belanja Modal & Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan GKS (2014-2019)



Sumber : BPS & DPJK, 2021 (data diolah)

Jika dilihat dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan melalui belanja modal retribusi daerah dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun jika dilihat pada gambar 5.9 di Kawasan Gerbangkertosusila retribusi daerah mengalami fluktuasi dan belanja modal yang meningkat namun masih membuat laju pertumbuhan ekonomi tetap mengalami

penurunan. Hal tersebut terjadi karena retribusi daerah memiliki penerimaan yang masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan penerimaan daerah lainnya, yang membuat kontribusi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kenaikan pajak daerah tidak dapat membuat peningkatan pada belanja modal. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa menggunakan pajak daerah.
2. Kenaikan retribusi daerah akan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Retribusi daerah yang dibayarkan langsung oleh masyarakat dapat digunakan pemerintah untuk melakukan belanja modal. Dari belanja modal tersebut pemerintah dapat menggunakannya untuk memberikan kontraprestasi secara langsung kepada masyarakat.
3. Kenaikan pajak daerah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya produktif akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun masih terdapat daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah meskipun pajaknya meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah dari pajak daerah yang rendah jika dibandingkan dengan dana yang berasal dari pemerintah pusat.
4. Kenaikan dari retribusi daerah tidak dapat membuat peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah dari retribusi daerah yang masih rendah jika membandingkannya dengan penerimaan daerah lainnya seperti pajak daerah, sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Kenaikan dari belanja modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal digunakan untuk menambah aset daerah guna untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun masih terdapat pemerintah daerah yang menggunakan anggarannya untuk membiayai belanja rutin

6. Kenaikan dari pajak daerah tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melalui pengalokasiannya untuk belanja modal. Hal ini dikarenakan pajak daerah masih digunakan untuk membiayai belanja rutin bukan untuk belanja modal. Sehingga dengan melalui belanja modal, pajak daerah tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
7. Kenaikan retribusi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melalui belanja modal. Retribusi daerah digunakan untuk membiayai belanja modal. Belanja modal ini dapat berupa infrastruktur yang akan digunakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan yakni :

1. Belanja modal memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan belanja modal dengan mengalokasikan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya.
2. Dengan pembentukan Kawasan Gerbangkertosusila diharapkan dapat pemeratakan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dengan melihat potensi dari pajak daerah yang meningkat maka diharapkan pemerintah dapat menggunakannya secara produktif misalnya

untuk belanja modal. Selain itu pendapatan daerah lainnya seperti retribusi daerah juga perlu ditingkatkan untuk membiayai belanja dari pemerintahan daerah.

3. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu adanya sebuah evaluasi dalam mengalokasikan pendapatan daerah
4. Perekonomian kabupaten dan kota Kawasan GKS ditunjang oleh sector perdagangan besar dan eceran, maka pemerintah perlu untuk mendongkrak pajak dari sector tersebut untuk dapat dialokasikan dalam belanja modal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.





DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ma'arif. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Cetakan I*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Anggarini, D. R. 2018. Pengaruh Total Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *Technobiz: International Journal Of Business*, Vol.1 No.1 (1-4). Diakses pada 25 Maret 2021

Aspan, H., Khaddafi, M., & Lestari, I. 2016. The Effect Of Local Taxes, Local Levies, General Allocation Funds (Dau), And Special Allocation Funds (Dak) To The Government Capital Expenditures Of Banda Aceh City. Diakses pada 27 Maret 2021

Badan Pusat Statistik, 2014-2019. *Kabupaten Gresik dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Gresik

Badan Pusat Statistik, 2014-2019. *Kabupaten Bangkalan dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Bangkalan

Badan Pusat Statistik, 2014-2019. *Kabupaten Mojokerto dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Mojokerto

Badan Pusat Statistik, 2014-2019. *Kabupaten Sidoarjo dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Sidoarjo

Badan Pusat Statistik, 2014-2019. *Kabupaten Lamongan dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Lamongan

Badan Pusat Statistik, 2014-2019. *Kota Mojokerto dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Kota Mojokerto

Badan Pusat Statistik, 2014-2019. *Kota Surabaya dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Kota Surabaya

Bado, B. 2016. A Belanja Modal, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 14(2), 118-126. Diakses pada 1 Mei 2021

Bai, J., & Li, J. 2011. Regional innovation efficiency in China: The role of local government. *Innovation*, 13(2), 142-153.

Bania, N., Gray, J. A., & Stone, J. A. 2007. Growth, taxes, and government expenditures: growth hills for US states. *National Tax Journal*, 60(2), 193-204

Barro, R. J. 1990. Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of political economy*, 98(5, Part 2), S103-S125

Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. 1992. Public finance in models of economic growth. *The Review of Economic Studies*, 59(4), 645-661.

Barro, R.J. & Sala-i-Martin, X. 1995 Economic Growth. London: McGraw-Hill

Binangkit, I. D. 2018. Pengaruh Faktor Makro-Ekonomi Terhadap Return Saham dengan Beta Saham Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2), 172-181

Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta

Bose, N., Haque, M. E., & Osborn, D. R. 2003. Public expenditure and growth in developing countries: Education is the key. *Centre for Growth and Business Cycle Research Discussion Paper Series*, 30

Cashin, P. 1995. Government spending, taxes, and economic growth. *Staff Papers*, 42(2), 237-269.

Damaningrum, A. 2015. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surakarta*, Skripsi, Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.



Dewi, J. K., & Budhi, M. K. S. 2018. Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(2018), 1695-1722. Diakses pada 26 Maret 2021

Díaz-Bautista, A., & González-Andrade, S. 2014. The debate of the modern theories of regional economic growth. *Ra Ximhai*, 10(6), 187-206. Diakses pada 15 September 2021

Diana, S. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata

Efendi, Y. 2014. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus di Aceh. 3 (2), 108-117. Diakses 10 November 2020

Elmi, Bachrul. 2012. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia

Fajria, Z., Wahono, B., & Farida, E. 2021. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 10(07).

Fitri, N., & Putri, S. 2019. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kawasan Barat Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Vol*, 3(1)

Fujita M, Krugman P & Venables A.J. 2001. *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade*. London :The MIT Press

Ghozali, Imam & Dwi Ratmono. 2008. *Akutansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*. Semarang: Universitas Diponegoro

Hakim, L. 2014. *Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Tahun 2008-2012 (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali)*,

Skripsi, Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya



Halim, N. L., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. 2019. Analisis Pendapatan Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Modal Dam Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado 2007-2015. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 18(2)

Humiang, M., Rumat, V., & Tumangkeng, S. 2015. Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Modal dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(01)

Husaini, U., & Purnomo, S. A. 2006. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara

Ibrahim, A., Asmawati, A., & Adamy, Y. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. In *Prosiding SEMDI-UNAYA (Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNAYA)* (Vol. 3, No. 1, pp. 672-684)

Ibrahim, F. N. A. 2018. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak), Belanja Modal, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Sulawesi. *Skripsi*, 1(912414001).

Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Juniati, P. I. 2018. *Analisis Pengaruh Inflasi, Retribusi Daerah dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta Tahun 2000-2014* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPF Universitas Brawijaya

Khusaini, M. 2007. Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Anggaran Daerah: Studi di Jawa Timur. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 1(1)

Khusaini, M. 2016. The role of public sector expenditure on local economic development. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 9(2), 182-193



Khusaini, M. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Bandung: Erlangga

Maribot, P Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mamesa, DJ. 1995. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Mamonto, S., Kalangi, J., & Tolosang, K. 2015. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(01).

Diakses pada 3 Mei 2021

Mangkoesebroto, Guritno. 2010. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : PEE-Yogyakarta

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI

Mardiasmo. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta : ANDI

Mesak Yandri Masela, S. E. 2011. *Hubungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Eks Karesidenan Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Mina, M., & Ratna, R. 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah di (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(1), 39-51

Mononimbar, R. W. 2017. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel intervening di kabupaten minahasa selatan (2005-2014). *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, 17(02). Diakses pada 6 April 2021



Mukarramah, Yolanda, C., & Zulkarnain, M. .2019. Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 105-117.

Mulyanti, D. 2017. Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan Executive Review. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No.1 (134-156). Diakses pada 20 Mei 2021.

Mutiara, D. J. 2015. Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Propinsi Kalimantan Timur. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1). Diakses pada 9 Mei 2021.

Natoen, A., Ardiani, S., Nouvanti, F., Prasetyo, G., & Safitri, M. D. 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan. *JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI*, 4(2), 158-168. Diakses pada 8 Mei 2021.

Nyarko-Asomani, A., Bhasin, V. K., & Aglobitse, P. B. 2019. Government capital expenditure, recurrent expenditure and economic growth in Ghana. *Ghanaian Journal of Economics*, 7(1), 44-70

Oktariansyah, O., Arifin, M. A., & Yunia, H. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(2), 193-211

Olaoye, O. O., Orisadare, M., & Okorie, U. U. 2019. Government expenditure and economic growth nexus in ECOWAS countries: A panel VAR approach. *Journal of Economic and Administrative Sciences*.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 1996 Tentang RTRW Provinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah



Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 1996 Tentang RTRW Nasional

Prasetya, F., & Pangesty, F. W. 2012. Linkages between public sector expenditure on economic growth and rural poverty in Indonesia. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 2(3), 2347-2353

Priambodo, A. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Economics Development Analysis Journal*, Vol.4, No.1 (1-9). Diakses pada 1 Mei 2021

Purba, S., Nababan, R., Muda, I., & Ginting, S. 2020. Regional Tax and Levies, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds Effects to the Capital Expenditures Allocation with Total Population as Moderating Variables in Districts/Cities in North Sumatera Provinces

Rambe, R. A., & Febriani, R. E. 2020. Peran Belanja Pemerintah dan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera.

Rahmawati, R., & Tjahjono, A. 2018. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Di Yogyakarta Tahun 2012-2016*, Skripsi, Program Sarjana Perpajakan dan Akutansi Sektor Publik, STIE Widya Wiwaha.

Rahmi, A. 2013. Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3)

Runtu, V. G. 2016. Pengaruh Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Modal Kota Manado (Periode 2005-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.16 No.3, (745-757)

Saputra, B., & Mahmudi, M. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 16(2)



Saragih, Juli . 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia: Bogor

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Situmorang V.M. & Sitanggang C. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sjafrizal, S. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Soewardi, T. J., Ananda, C. F., & Khusaini, M. 2017. Local Taxes and Pro-cyclical Fiscal Policy in Indonesia. *International Journal of Economics & Management*, 11.

Soewardi, T. J, Ananda C.F & Erlando A. 2018. Analisis Hubungan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1128-1148

Subianto, S., & Sipahutar, F. Y. 2020. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. *Jurnal Interprof*, 6(2), 103-115. Diakses pada 6 Mei 2021

Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribudi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1689-1718. Diakses pada 29 Maret 2021.

Sufardi, S. 2019. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai Ditinjau dari Faktor Pajak dan Retribusi Daerah. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 2(2), 174-181. Diakses pada 28 Maret 2021.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka baru press.

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Kencana



Sunarto & Sunyoto, T. 2016. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Dan kota di Jawa Tengah). *Dharma Ekonomi*, 13(43), 13-22

Suryani, F., & Pariani, E. 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *PEKA*, 6(1), 11-22

Tambunan, Tulus. 2006. Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah. *Kadin Indonesia-Jetro 2006*

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Tawakkal, U. 2018. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Luwu Utara. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 210-217. Diakses pada 1 Mei 2021.

Thornton, J. 2007. Fiscal decentralization and economic growth reconsidered. *Journal of urban economics*, 61(1), 64-70. Diakses 2 November 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2006.06.001>

Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2014. *Economic Development Twelfth edition*. USA: PEARSON

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah



Utomo, L.P., Asyik, N.F & Hermanto, S.B .2017. Belanja Modal Memediasi Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 116

Verawaty, V. 2015. Determinan Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Vodounhessi, A., & von Münch, E. 2006. Financial challenges to making faecal sludge management an integrated part of the ecosan approach: Case study of Kumasi, Ghana. *Water Practice and Technology*, 1(2).
<https://doi.org/10.2166/wpt.2006.045>

Waryanto, P. 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35-55

Wati, E. R. 2010. Hubungan Antara PAD dan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal Pemda Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(2)

Yolanda, C., & Zulkarnain, M. 2019. Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 105-117. Diakses pada 21 April 2021.

Zaenuddin, Muhammad. 2012. *Isu, Problematika dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik : Kumpulan Essay, Kajian dan Hasil Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta : CV BUDI UTAMA.





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR SAMPEL PENELITIAN

No.	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bangkalan
2	Kabupaten Mojokerto
3	Kota Mojokerto
4	Kabupaten Gresik
5	Kabupaten Sidoarjo
6	Kabupaten Lamongan
7	Kota Surabaya

LAMPIRAN 2

TABULASI DARI VARIABEL PENELITIAN

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Pajak daerah	LN PD	Retribusi daerah	LN RD	PE	LN PE	Belanja Modal	LN BM
1	Kab Bangkalan	2014	23,470,520	16.97	20,284,222	16.83	17,369,200,000	23.58	331,828,632	19.62
2	Kab Bangkalan	2015	27,244,911	17.12	16,981,194	16.65	16,906,800,000	23.55	480,529,384	19.99
3	Kab Bangkalan	2016	32,293,793	17.29	15,233,482	16.54	17,018,600,000	23.56	412,823,000	19.84
4	Kab Bangkalan	2017	40,866,209	17.53	15,662,532	16.57	17,618,600,000	23.59	296,055,032	19.51
5	Kab Bangkalan	2018	49,473,211	17.72	14,682,564	16.50	18,361,400,000	23.63	324,705,615	19.60
6	Kab Bangkalan	2019	50,833,629	17.74	14,326,974	16.48	18,550,800,000	23.64	420,929,339	19.86
7	Kab Mojokerto	2014	185,724,705	19.04	43,173,235	17.58	53,203,600,000	24.70	365,470,000	19.72
8	Kab Mojokerto	2015	229,078,098	19.25	41,303,221	17.54	59,184,900,000	24.80	491,829,693	20.01
9	Kab Mojokerto	2016	251,510,000	19.34	37,221,622	17.43	49,360,600,000	24.62	442,333,000	19.91
10	Kab Mojokerto	2017	312,444,041	19.56	41,026,808	17.53	52,187,800,000	24.68	576,646,344	20.17
11	Kab Mojokerto	2018	333,314,905	19.62	45,646,283	17.64	55,256,600,000	24.74	554,143,666	20.13
12	Kab Mojokerto	2019	349,914,625	19.67	45,525,753	17.63	58,467,100,000	24.79	544,686,738	20.12
13	Kota Mojokerto	2014	25,092,877	17.04	10,886,961	16.20	3,774,600,000	22.05	141,591,947	18.77
14	Kota Mojokerto	2015	31,324,086	17.26	11,862,967	16.29	3,991,400,000	22.11	135,968,848	18.73
15	Kota Mojokerto	2016	35,333,988	17.38	13,006,473	16.38	4,221,800,000	22.16	303,737,000	19.53
16	Kota Mojokerto	2017	47,423,790	17.67	7,661,594	15.85	4,460,400,000	22.22	121,144,916	18.61
17	Kota Mojokerto	2018	47,920,074	17.69	9,792,406	16.10	4,718,900,000	22.27	119,434,272	18.60
18	Kota Mojokerto	2019	51,615,256	17.76	9,897,775	16.11	4,985,700,000	22.33	134,616,621	18.72



19	Kab Sidoarjo	2014	608,692,188	20.23	96,645,390	18.39	106,434,300,000	25.39	691,163,487	20.35
20	Kab Sidoarjo	2015	700,498,296	20.37	139,369,832	18.75	112,012,900,000	25.44	936,192,614	20.66
21	Kab Sidoarjo	2016	735,768,000	20.42	106,607,000	18.48	118,179,200,000	25.50	809,998,000	20.51
22	Kab Sidoarjo	2017	925,569,237	20.65	80,087,712	18.20	125,039,100,000	25.55	565,233,558	20.15
23	Kab Sidoarjo	2018	961,840,717	20.68	93,100,506	18.35	132,552,900,000	25.61	810,565,148	20.51
24	Kab Sidoarjo	2019	1,032,160,117	20.75	72,709,215	18.10	140,492,900,000	25.67	800,179,139	20.50
25	Kab Lamongan	2014	62,762,113	17.95	32,608,916	17.30	21,099,900,000	23.77	353,435,615	19.68
26	Kab Lamongan	2015	77,548,886	18.17	24,724,667	17.02	22,316,900,000	23.83	459,305,792	19.95
27	Kab Lamongan	2016	114,982,000	18.56	27,118,546	17.12	23,623,800,000	23.89	616,500,000	20.24
28	Kab Lamongan	2017	142,025,801	18.77	30,574,992	17.24	24,923,000,000	23.94	505,221,589	20.04
29	Kab Lamongan	2018	129,214,808	18.68	15,341,144	16.55	26,279,800,000	23.99	531,811,348	20.09
30	Kab Lamongan	2019	144,919,590	18.79	15,725,711	16.57	27,706,200,000	24.04	490,432,716	20.01
31	Kab Gresik	2014	386,741,657	19.77	111,030,586	18.53	76,336,000,000	25.06	523,804,897	20.08
32	Kab Gresik	2015	450,326,075	19.93	117,641,024	18.58	81,380,400,000	25.12	584,223,675	20.19
33	Kab Gresik	2016	412,113,000	19.84	77,108,546	18.16	85,850,100,000	25.18	413,340,000	19.84
34	Kab Gresik	2017	496,995,074	20.02	78,798,888	18.18	90,855,600,000	25.23	422,641,766	19.86
35	Kab Gresik	2018	575,859,024	20.17	73,435,779	18.11	96,131,600,000	25.29	369,883,330	19.73
36	Kab Gresik	2019	641,744,041	20.28	80,949,444	18.21	101,346,500,000	25.34	538,046,525	20.10
37	Kota Surabaya	2014	2,427,647,860	21.61	270,112,725	19.41	305,947,600,000	26.45	1,404,366,425	21.06
38	Kota Surabaya	2015	2,738,899,424	21.73	537,319,752	20.10	324,215,200,000	26.50	1,785,125,255	21.30
39	Kota Surabaya	2016	3,000,150,000	21.82	339,453,000	19.64	343,652,600,000	26.56	1,789,390,000	21.31
40	Kota Surabaya	2017	3,595,670,492	22.00	557,966,574	20.14	364,714,800,000	26.62	2,517,891,658	21.65



41	Kota Surabaya	2018	3,817,402,592	22.06	346,798,583	19.66	387,303,900,000	26.68	2,430,061,039	21.61
42	Kota Surabaya	2019	4,018,722,251	22.11	396,244,802	19.80	410,879,300,000	26.74	2,754,304,824	21.74

Keterangan :

LN PD : Logaritma Natural Pajak Daerah

LN RD : Logaritma Natural Retribusi Daerah

LN PE : Logaritma Natural Pertumbuhan Ekonomi

LN BM : Logaritma Natural Belanja Modal



LAMPIRAN 3

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

a. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pajak Daerah

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	42	16.97	22.11	19.3098	1.56518
Valid N (listwise)	42				

b. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Retribusi Daerah

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Retribusi Daerah	42	15.85	20.14	17.6771	1.18739
Valid N (listwise)	42				

c. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Belanja Modal

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	42	18.60	21.74	20.0619	.76539
Valid N (listwise)	42				

d. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	42	22.05	26.74	24.5336	1.35386
Valid N (listwise)	42				



LAMPIRAN 4

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

a. Uji Regresi Linier Berganda dengan Belanja Modal sebagai variabel dependen

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.888 ^a	.789	.778	.36038

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.093	.897		11.249	.000
	Pajak Daerah	.052	.113	.107	.462	.647
	Retribusi Daerah	.507	.149	.786	3.391	.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Uji Regresi Linier Berganda dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Dependen

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.969 ^a	.940	.935	.34473

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.645	1.768		.930	.358
	Pajak Daerah	.398	.109	.461	3.663	.001
	Retribusi Daerah	.303	.163	.265	1.860	.071
	Belanja Modal	.491	.153	.278	3.205	.003

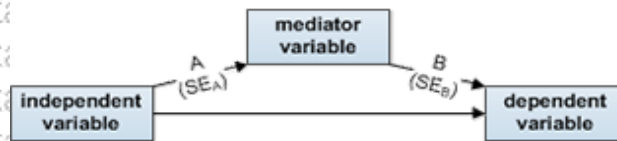
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi



LAMPIRAN 5

HASIL UJI SOBEL

a. Uji Sobel dengan variabel pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila



A: ?

B: ?

SE_A: ?

SE_B: ?

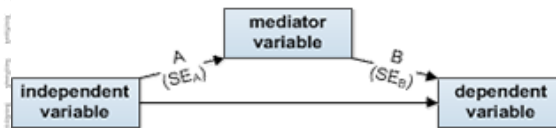
Calculate!

Sobel test statistic: 0.83971678

One-tailed probability: 0.20053360

Two-tailed probability: 0.40106720

b. Uji Sobel dengan variabel pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Kawasan Gerbangkertosusila



A: ?

B: ?

SE_A: ?

SE_B: ?

Calculate!

Sobel test statistic: 1.71794016

One-tailed probability: 0.04290377

Two-tailed probability: 0.08580753



LAMPIRAN 6

Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Halim N , Kumenaung A & Engka D.S (2019)	Menganalisis besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung antara pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi	Analisis Jalur	Hasil penelitian menyatakan secara langsung antara variabel pajak dan retribusi daerah tidak memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta secara tidak langsung variabel tersebut memiliki korelasi positif namun memiliki tingkat signifikansi yang masih rendah
2.	Mutiara D (2015)	Menganalisis mengenai pengaruh pajak daerah , retribusi daerah, belanja modal serta tingkat dari partisipasi angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2004-2013.	Analisis regresi linier berganda	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan namun berpengaruh negatif terhadap produk domestik regional bruto.
3.	Damaningrum (2015)	Menganalisis pengaruh pajak, retribusi, pengeluaran daerah terhadap	Analisis regresi linier berganda	Dari hasil analisis menyatakan bahwa hasil bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan, namun retribusi daerah memiliki



No	Nama Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta		pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta
4.	Masela Y & Halim A (2011)	Menganalisis korelasi pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Malang 1999-2009	Analisis Korelasi	Hasil analisis mengemukakan pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum mempunyai hubungan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5.	Rodriguez & Kroijer A (2018)	Menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Eropa Tengah dan Timur tahun 1990–2004	Analisis regresi	Hasil analisis menyatakan bahwa transfer pemerintah berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pajak daerah memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.
6.	Sufardi (2019)	Mengetahui dan menganalisis mengenai pengaruh dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap	Analisis regresi linier berganda	Hasil analisis menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di



No	Nama Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan		Kabupaten Sinjai
7.	Nugraha I & Dwirandra (2016)	Menganalisis mengenai pengaruh dari kemampuan pertumbuhan ekonomi yang memoderasi pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013	Analisis regresi linier berganda	Hasil analisis menyatakan bahwa pajak, retribusi daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sementara itu dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi variabel moderasi antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal, namun tidak dapat menjadi variabel moderasi antara dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal.
8.	Subianto & Sipahutar F. Y (2020)	Menganalisis mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di pemerintahan daerah Kota Lubuklinggau tahun 2015-2019.	Analisis regresi linier berganda	Dari hasil analisis diketahui bahwa secara parsial dan simultan pajak dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.



No	Nama Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Aspan H, Khaddafi M & Lestari I (2016)	Menganalisis mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Kota Banda Aceh tahun 2006-2013	Analisis regresi linier berganda	Hasil analisis bahwa pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal di Kota Banda Aceh.
10.	Purba dkk (2018)	Menganalisis mengenai pengaruh pajak, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan menggunakan total populasi sebagai variabel moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara di tahun 2014–2016	Analisis regresi linier berganda	Dari hasil analisis menyatakan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Jumlah populasi total mampu menjadi variabel moderasi untuk semua variabel terhadap belanja modal.
11.	Bai Junhong & Li Jing (2011)	Menganalisis mengenai efisiensi inovasi regional di China dan utamanya untuk	Analisis regresi	Dari hasil analisis menyatakan pajak daerah digunakan untuk belanja modal dalam R&D dalam meningkatkan inovasi daerah di China.



No	Nama Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		menganalisis pengaruh pemerintah lokal dalam efisiensi inovasi daerah		
12.	Fitri N & Putri S (2019)	Menganalisis mengenai besarnya pengaruh belanja pegawai dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia tahun 2008-2015	Analisis regresi & Granger causality test	Hasil analisis menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. serta memiliki hubungan yang searah
13.	Ibrahim F, Arham M & Abdul I (2018)	Menganalisis mengenai dana alokasi khusus, belanja modal dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Sulawesi di tahun 2007-2016	Analisis regresi	Dari hasil analisis menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
14.	Bose N, Haque M & Osborn D (2003)	Menganalisis mengenai dampak dari pertumbuhan	Analisis regresi	Dari hasil analisis menyatakan bahwa belanja modal pemerintah dalam produk domestik bruto (PDB)



No	Nama Peneliti	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		dengan adanya belanja modal di 30 negara berkembang pada tahun 1970–1980 dengan fokus pada pengeluaran sektoral		berkorelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal untuk bidang pendidikan merupakan satu-satunya belanja sektoral yang secara signifikan terkait pertumbuhan ekonomi
15.	Humiang, Rimate & Tumangke ng S (2015)	Menganalisis mengenai pengaruh pengaruh investasi swasta, belanja modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado pada tahun 2003-2012	Analisis regresi linier berganda	Dari hasil analisis menyatakan bahwa investasi swasta dan belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado

Sumber : Data diolah peneliti (2021)